

SKRIPSI
ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (STUDI KASUS PADA
KELURAHAN WARMASEN KABUPATEN RAJA AMPAT)



Disusun Oleh

Nama : FELDA RAMADANI

NIM : 146220121027

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
TAHUN 2025

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (STUDI KASUS PADA
KELURAHAN WARMASEN KABUPATEN RAJA AMPAT)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk ujian skripsi
Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (STUDI KASUS PADA KELURAHAN WARMASEN KABUPATEN RAJA AMPAT)

NAMA : FELDA RAMADANI

NIM : 146220121027

Telah disetujui oleh tim pembimbing

Pada , 24 Juni 2025

Pembimbing I

Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc

NIDN. 1407039501



Pembimbing II

Dr. Andi Irwan, M.M.

NIDN. 0906018401



HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (STUDI KASUS PADA KELURAHAN WARMASEN KABUPATEN RAJA AMPAT)

NAMA : FELDA RAMADANI
NIM : 146220121027
WAKTU PENELITIAN : 10 April 2024 – 30 Mei 2025

Skripsi ini telah di uji oleh di uji oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: Sorong, 24 Juni 2025

Dewan Penguji Skripsi
Pembimbing Skripsi



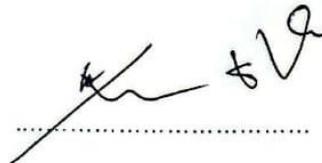
Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc.
NIDN. 1407039501

Ketua Penguji



Alyn Wulandary, S.E. M.Ak., Akt.
NIDN. 1409039302

Anggota Penguji



Yusron Dfinubun, S.E., M.Acc.
NIDN. 1407079001

Sorong,
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora



Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si.
NIDN. 1419099401

iv

HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FELDA RAMADANI

NIM : 146220121027

Judul Skripsi : **Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Pada Kelurahan Warmasen Kabupaten Raja Ampat)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Sorong, 23 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Felda Ramadani

146220121027

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dia-lah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

(QS. Az-Zumar: 53)

"Hidup bukan tentang seberapa terang kita bersinar, tapi seberapa tulus cahaya itu mampu menghangatkan hati yang hampir padam."

-FeldaRmdn

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta yang tak pernah cukup untuk membalas segala kasih dan pengorbanan kedua orang tuaku. Kepada sosok ayah dan ibu, pelita dalam gelap, payung dalam badai yang tak pernah lelah mendoakan, meski aku tak selalu mendengar. Setiap tetes peluh dan sabar kalian adalah alasan aku bisa berdiri sampai di titik ini. Untuk semua insan yang hadir dalam perjalanan ini dengan kata sederhana, pelukan hangat, atau sekadar diam yang menguatkan terima kasih telah menjadi bagian dari langkahku.

ABSTRAK

Felda Ramadani/146220121027. **ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (STUDI KASUS PADA KELURAHAN WARMASEN KABUPATEN RAJA AMPAT)** , Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Juni 2025.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengolaan anggaran Kelurahan Warmasen mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. (2) Untuk melihat Bagaimana pemerintah Kelurahan Warmasen mengalokasikan anggaran dalam program kerja kelurahan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (*case Study*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dala penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini total 5 informan yang di ambil dari 2 orang di kantor distrik, 1 orang di kantor lurah dan 2 orang warga. Hasil dari penelitian ini bahwa transparansi dan akuntabilitas di kelurahan warmasen belum terlaksana karena kelurahan belum menyediakan media informasi seperti papan informasi, website serta tidak melaksanakan ertemuan warga untuk pengambilan keputusan. saat menyusun program kerja yang sesuai ketentuan, sasaran untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas Kelurahan Warmasen belum sepenuhnya terwujud.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Anggaran Kelurahan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis memanjatkan syukur kepada Allah SWT yang Maha segalanya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (STUDI KASUS PADA KELURAHAN WARMASEN KABUPATEN RAJA AMPAT)”** ini pada waktu yang sudah ditentukan.

Penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi saya hingga skripsi ini selesai dengan tepat waktu.
2. Nabi Muhammad SAW, sosok teladan sepanjang zaman, yang dengan sinar wahyu-Nya menerangi kegelapan jiwa dan menuntun umat ke arah kebenaran.
3. Bapak Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, saya ucapkan terimakasih karena telah mengizinkan penulis untuk menempuh pendidikan di UNIMUDA Sorong.
4. Bapak Fuad Ardiansyah, S. Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora.
5. Bapak Munzir, S.E., M.Ak. selaku Dekan II Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora.
6. Ibu Alyn Wulandary, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Ekonomi Bisnis dan Humaniora.
7. Ibu Annis' Khaerani, S.E., M.Acc. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. Andi Irwan, M.M. selaku pembimbing II penulis ucapkan terimakasih atas bimbingan, dukungan selama serta segudang ilmu yang Ibu Bapak berikan selama menyusun skripsi ini sampai selesai.
8. Terima kasih kepada diriku sendiri, yang telah mengambil keputusan untuk terus berjuang tanpa menyerah, yang terus melangkah meskipun sudah lelah. Karena tanpa keberanian dan keyakinan di dalam hati, skripsi ini tidak mungkin bisa diselesaikan.

9. Terima kasih kepada Bapak Ibu penulis Bapak La Zumdi dan Ibu Herlina yang selalu mencurahkan doa, dukungan serta perhatian yang tidak terduga selama penyusunan skripsi ini hingga mengantarkan penulis sampai di titik ini.
10. Terima kasih yang tak terhingga kuucapkan kepada abangku tercinta Adam yang selalu memberi dukungan dalam bentuk materi, rupiah serta semangat tanpa pamrih. Seluruh adik-adik yang penulis cintai Serina, Sigit, Maret dan Remon. Saat langkah ini terasa berat kalian semua hadir sebagai penguat. Dukungan kalian semua menjadi jembatan yang membuat saya bisa sampai sejauh ini.
11. Teman seperjuangan saya selama menyusun skripsi Putri Nur Isnaini dan Intan Darmayanti penulis ucapkan terimakasih yang mendalam atas dukungan, waktu, canda tawa serta suka duka selama menyusun skripsi. Serta teman seperjuangan saya Mirasti Manggalatu, Nur Azizah, latifah Dinar dan seluruh teman dilingkungan Akuntansi angkatan 2021 yang menemani langkah penulis dari tahun 2021 sampai penulis menyelesaikan masa studi.
12. Teman satu kos Asri yang sudah menemani dari sebelum mengenal kampus hingga penulis menyelesaikan masa studi terimakasih atas waktu dan dukungan sangat besar.
13. Kepada insan yang berinisial A yang begitu berarti dalam hidup penulis terimakasih sudah kebersamaan penulis dalam perjuangan, atas kesabaran, waktu yang kau luangkan untuk mendengar keluh kesah penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima semua masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini bisa memberikan keuntungan bagi para pembaca dan semua pihak yang terkait.

Walaikumsalam Wr.Wb.

Sorong, 06 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kajian Teori	6
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theori</i>).....	6
2.1.2 Transparansi	6
2.1.3 Akuntabilitas	8
2.1.4 Good Governance.....	10
2.1.5 Alokasi Anggaran Kelurahan.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Kesenjangan Penelitian (<i>Research Gap</i>).....	15
2.4 Kerangka Pemikiran.....	16
BAB III	17
METODE PENELITIAN.....	17

3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian	17
3.2.1 Tempat Penelitian.....	17
3.2.2 Waktu Penelitian	17
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.4 Teknik Analisis Data.....	19
3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas	21
BAB IV	22
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian	22
4.1.1 Letak Geografis.....	22
4.1.2 Kondisi Sosial	23
4.1.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Warmasen	23
4.2 Hasil Penelitian	23
4.2.1 Transparansi Informasi Publik.....	24
4.2.2 Akuntabilitas Anggaran	27
4.2.3 Pertanggungjawaban Anggaran	28
4.2.4 Alokasi Anggaran.....	29
4.2.5 Kendala Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas alokasi Anggaran	32
4.3 Pembahasan Hasil Analisis	35
4.4 Keterkaitan Hasil Analisis Dengan Teori Agensi	36
BAB V.....	38
KESIMPULAN.....	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu</i>	13
<i>Tabel 3. 1 Waktu Penelitian</i>	18
<i>Tabel 3. 2 Biodata Informan</i>	19
<i>Tabel 4. 1 Transparansi Informasi Publik</i>	25
<i>Tabel 4. 2 Akuntabilitas Anggaran</i>	27
<i>Tabel 4. 3 Pertanggungjawaban Anggaran</i>	28
<i>Tabel 4. 4 Alokasi Anggaran.....</i>	29
<i>Tabel 4. 5 Kendala Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas.....</i>	32

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir</i>	16
<i>Gambar 3. 1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....</i>	20
<i>Gambar 4. 1 kantor kelurahan Warmasen.....</i>	22
<i>Gambar 4. 2 Analisis Data Creswell</i>	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara	45
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	48
Lampiran 3. Hasil Analisis Data	85
Lampiran 4. Member Check In	86
Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alokasi anggaran yang disalurkan untuk kelurahan ialah bentuk desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menjalankan pembangunan di suatu daerah (Sembiring, et al 2024). Dimana pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabilitas dalam pemerintahan berdampak pada efektifitas penggunaan anggaran (Miftakhul & Nur 2024). Kabupaten Raja Ampat saat ini menjadi perhatian khusus dikarenakan sumber daya alam yang melimpah serta pariwisata yang memadai (Universitas Kristen Satya Wacana, 2025). Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah, besar keinginan masyarakat Kelurahan untuk mengetahui sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran telah diterapkan. Saat ini penggunaan teknologi sebagai sarana penyampaian informasi telah banyak diterapkan di berbagai kantor pemerintahan, dan ini menjadi tugas suatu pemerintah setempat untuk mengelola informasi demi keterbukaan data (Alfiah, 2024).

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang membahas otonomi daerah ialah hak, wewenang serta kewajiban suatu daerah otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat yang ada dalam lingkungan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah Otonom merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya masing-masing (Dian 2024:1). Pemerintahan Daerah diserahkan tanggungjawab dan wewenang lewat asas desentralisasi demi mengatur rumah tangganya sendiri menurut kemampuan masing-masing daerah, juga Kelurahan sebagai bagian pemerintahan terkecil (Stevani, 2023). Berbeda dengan desa yang memiliki pemerintahan sendiri, kelurahan adalah bagian dari pemerintah daerah yang tergabung dalam kecamatan dan tidak meemiliki kekuasaan langsung dalam pengolaan anggaran. Maka dari itu, anggaran kelurahan biasanya dikelola dengan satu pintu melalui kecamatan/distrik yang berperan sebagai pengguna anggaran.

Kelurahan merupakan satuan pemerintah daerah yang terkecil, yang menjadi bagian utama dari akuntansi pemerintah suatu daerah kabupaten atau kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu pertanggungjawaban keuangan Kelurahan baiknya di atur secara nasional (Samsul & Egita 2021). Dinyatakan bahwa Kelurahan memiliki kewajiban memberikan pelayanan surat-surat Kependudukan. Pelayanan kepada publik kinerja pemerintah yang paling terlihat jelas, di mana masyarakat bisa langsung menilai kinerja suatu pemerintah dari kualitas pelayanan yang diterima (Atikah 2022). Ini menandakan bahwa masyarakat dan petugas pemerintahan kelurahan perlu berkolaborasi dalam mengelola kebutuhan rumah tangga kelurahan, dengan begitu, kelurahan dapat berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di daerah tersebut (Umiani & Sujana, 2021)

Kemandirian suatu instansi dapat dilihat dari pengelolaan pemerintah yang efektif (*Good Governance*). Melalui anggapan *good governance*, harapannya pemerintah bisa memperbaiki kinerja serta lebih efisien dalam menunaikan tugas sebagai penanggung jawab urusan publik yang berfokus pada kepentingan masyarakat (Zai et al., 2022). Manfaat diterapkannya prinsip *good governance* besar potensi pemerintah untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kinerja pemerintah Ini mencakup beberapa elemen penting seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Anggaran yang akuntabilitas, transparansi serta efisien dalam penggunaan dana untuk masyarakat dapat dijamin dengan pengelolaan keuangan yang efektif (Siti et al., 2023). Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab suatu instansi untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran serta hasil yang dicapai. Sementara itu, transparansi suatu anggaran meliputi keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur (Ary et al., 2024).

Setiap tahun, alokasi anggaran untuk kelurahan sudah menjadi hal yang pasti dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perangkat kelurahan serta mendukung berbagai program dan kegiatan yang dijalankan di tingkat

kelurahan (Charles 2022). Dalam Proses Alokasi anggaran, dibutuhkan partisipasi masyarakat serta pihak pemerintah sebagai penanggungjawab demi mewujudkan keberhasilan alokasi anggaran. Pihak pemberi amanah mempunyai tanggung jawab meminta pertanggungjawaban kepada pemegang amanah (*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas disebut akuntabilitas dan transparansi (Ernawan & Rusmawan, 2024). Teori Agensi ini menekankan hubungan antara prinsipal, yaitu masyarakat, dan agen, yaitu pemerintah. Jika beberapa hal tersebut dilakukan dengan baik oleh pemerintah setempat, maka mungkin masyarakat bisa lebih mengembangkan diri untuk memperoleh kemajuan bersama serta menjadi masyarakat yang lebih berpotensi (Firda, 2024).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya secara efektif, serta melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*) (Dian 2024). Sedangkan transparansi dalam manajemen keuangan suatu daerah penting hal ini tidak hanya sebagai wujud komitmen daerah dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal, serta sebagai dasar untuk akuntabilitas publik. Transparansi ini penting dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana publik, pencegahan penyimpangan dalam penggunaan keuangan Negara atau tindakan korupsi selain itu, transparansi juga bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat mulai dari tahap pelaksanaan, perencanaan hingga pengawasan pengelolaan keuangan (Jumiati et al., 2023).

Kantor Lurah, sebagai bagian dari organisasi pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, memikul tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif (Riyadul 2024). Sebelum pemerintah kelurahan melakukan rencana pembangun tentunya suatu pemerintah melakukan sesuai permintaan dalam diskusi saat musrenbangkel. Musrenbangkel adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah kelurahan, dengan

melibatkan warga serta pemangku kepentingan lainnya dalam kerjasama yang harmonis (Kobar, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Penelitian oleh (Miftakhul & Nur 2024) menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur transparansi anggaran, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan rendahnya literasi keuangan warga. Sementara itu, studi oleh (Umiani & Sujana 2021) menyoroti bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dipengaruhi oleh keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah kelurahan. Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji transparansi dan akuntabilitas alokasi anggaran di wilayah kepulauan Kabupaten Raja Ampat yang secara spesifik membahas proses penyusunan anggaran yang di lakukan di instansi tertinggi atau biasa di sebut satu pintu di mana pengaturan anggaran dilakukan dengan kerjasama di level distrik.

Dari hasil observasi awal di Kelurahan warmasen kabupaten Raja Ampat menunjukkan bahwa masih kurangnya edukasi dari pemerintah setempat terkait pengelolaan anggaran serta minimnya sosialisasi mengenai cara mengakses informasi anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, masyarakat kurang memahami penggunaan anggaran serta tidak memiliki keterlibatan aktif dalam pengawasan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi, seperti kurangnya ketersediaan media informasi yang dapat diakses publik, misalnya papan informasi atau situs web resmi pemerintah kelurahan. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara mendalam meneliti mekanisme penyampaian informasi anggaran oleh pemerintah kelurahan serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan anggaran.

Dari latar belakang yang sudah terlampir sebelumnya, maka penulis mengangkat masalah berikut dalam skripsi **“ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (STUDI**

KASUS PADA KELURAHAN WARMASEN KABUPATEN RAJA AMPAT)”. AMPAT)”).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini ialah:

- 1) Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengolaan anggaran Kelurahan Warmasen Kabupaten Raja Ampat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban?
- 2) Bagaimana pemerintah Kelurahan Warmasen mengalokasikan anggaran dalam program kerja kelurahan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengolaan anggaran Kelurahan Warmasen mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
- 2) Untuk melihat Bagaimana pemerintah Kelurahan Warmasen mengalokasikan anggaran dalam program kerja kelurahan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan patokan pemerintah kelurahan dalam penggunaan anggaran kelurahan dan lebih meningkatkan proses penyampaian informasi.
- 2) Manfaat bagi masyarakat harapanya menjadikan masyarakat yang peduli dan mengambil peran dalam proses pelaksanaan alokasi anggaran kelurahan.
- 3) Secara akademis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang mengangkat topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theori*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) Melibatkan hubungan antara pemberi kuasa (*principal*) dan penerima kuasa (*agent*) (Ernawan & Rusmawan, 2024). Pada hubungan ini, masyarakat (prinsipal) menunjuk aparat Kelurahan (*Agent*) untuk melaksanakan tugas tertentu Atas nama mereka, termasuk dalam hal ini adalah pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 2019).

Hubungan kontraktual dapat berjalan dengan baik, maka dari itu *principal* akan memberikan kewenangan dalam penyerahan keputusan kepada agen (Putri, Sudiana, & Putra, 2021). Pemerintah disini sebagai sebagai agen menjalankan wewenang di suatu instansi dan masyarakat sebagai *principal* yang berhak untuk melihat nilai pertanggung jawaban kinerja suatu pemerintah. Teori ini menekankan pentingnya transparansi untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas agen kepada *principal* atau masyarakat.

2.1.2 Transparansi

Transparansi ialah langkah kerja data yang dibuat dengan tujuan untuk memberdayakan seluruh masyarakat untuk memperoleh data yang berbeda mengenai administrasi terbuka (Aslan 2022). Dalam teknik transparansi seluruh dokumen yang sudah tersedia serta mudah dijangkau adalah perhatian yang sangat utama dalam mencapai standar kualitas transparansi sebuah instansi atau suatu badan pemerintah. Dokumen yang di sediakan organisasi atau pemerintah yaitu dokumen yang didalamnya memuat seluruh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Novieta et al., 2024). Teori ini menggarisbawahi pentingnya transparansi informasi guna mengurangi ketimpangan informasi antara prinsipal dan agen (Santoso et al., 2024).

Menurut Nasution et al., 2024 adapun prinsip-prinsip transparansi diantaranya:

- 1) Tersedianya akses yang mudah dan pemahaman yang jelas mengenai informasi terkait pendanaan, status pelaksanaan, serta berbagai jenis dukungan atau program lain.
- 2) Ada publikasi dan media yang menyajikan informasi mengenai tahap-tahap kegiatan serta rincian keuangan.
- 3) Masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan laporan bulanan yang lengkap dengan dokumentasi serta bukti penggunaan sumber daya yang digunakan dalam proyek yang telah dilaksanakan.
- 4) Adanya laporan tahunan kelurahan yang mencakup aspek keuangan dan perencanaan operasional, beserta penyerahan dokumentasi penduduknya.
- 5) Adanya situs web atau media lainnya yang berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Kelurahan.
- 6) Tersedia tata cara untuk distribusi informasi.

Instansi dalam menerapkan transparansi atas segala aktivitas yang dijalankan akan memberikan beberapa manfaat diantaranya (stevani 2023):

- 1) Mengantisipasi terjadinya korupsi.
- 2) Menambah kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tertentu sekaligus memperkuat kohesi sosial.
- 3) Kepercayaan publik yang terbentuk akan menjadi pondasi yang kokoh dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
- 4) Lebih mudah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu kebijakan.
- 5) Serta meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mampu menilai kinerja pemerintah.

Transparansi dalam segala kegiatan dan keputusan yang diambil dalam sebuah organisasi bertujuan untuk menjunjung keadilan ((Rina & Yenni, 2023).

Transparansi setidaknya mencakup tiga aspek kritis, yaitu sistem, kapitalis yang mendukung produksi, dan jaminan informasi yang terstruktur. Ketiga aspek ini saling berhubungan, hanya memiliki ketersediaan informasi tidaklah cukup jika tidak disertai dengan penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung (Inrfansyah et al., 2023).

Salah satu contoh transparansi di suatu instansi ialah keterbukaan asal keuangan serta jumlahnya, bagaimana rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya hingga memudahkan masyarakat untuk mengetahuinya (Andi & Nila 2020). Transparansi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada keterusterangan informasi tentang penggunaan dana publik, hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengetahui anggaran yang dialokasikan di manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Proses yang transparansi bagi seluruh masyarakat adalah salah satu tanda ukur penting didalam mewujudkan pedoman transparansi dalam suatu lembaga pemerintahan.

2.1.3 Akuntabilitas

Teori akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai ide yang mengacu pada seseorang atau organisasi harus memikul tanggung jawab atas keputusan atau upaya yang diambil. Konsep ini sering digunakan dalam pemerintahan dan manajemen publik, di mana pihak yang bertanggung jawab harus menjelaskan keputusan atau tindakan yang mereka ambil (Ariyani & Noeraini, 2023). Pihak yang memberikan amanah memiliki tanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban dari pemegang amanah (agen) dalam bentuk penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas yang dilakukan, yang semuanya dikenal sebagai akuntabilitas (Ernawan & Rusmawan, 2024).

Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar masyarakat memahami bagaimana suatu anggaran di kelola demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan. Hal ini penting agar setiap aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Christine et al., 2022). Sebagai pemangku kepetingan dalam menjalankan tugasnya harus memegang teguh keadilan dan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan.

Indrie Avisha (2023) ciri-ciri akuntabilitas diantaranya:

- 1) Bisa menyampaikan sebuah informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah dengan cara terbuka, cepat dan akurat kepada masyarakat.

- 2) Dapat menyajikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat luas.
- 3) Dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan pemerintah.
- 4) Dapat memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban setiap kebijakan publik dengan cara yang proporsional
- 5) Tersedianya fasilitas bagi masyarakat luas untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui akuntabilitas publik, masyarakat dapat menilai sejauh mana pencapaian pelaksanaan rencanam kegiatan pemerintah.

Pemerintah/instansi mempunyai tugas untuk menyediakan laporan keuangan sebagai bentuk penegak akuntabilitas publik. laporan keuangan dalam akuntansi merupakan rangkaian seluruh transaksi dan memberikan manfaat sebagai bukti dan dijadikan sebagai pengambilan keputusan di periode berikutnya. Dalam setiap lembaga pemerintahan harus mengelola laporan keuangan dengan transparansi, Akuntabilitas serta sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan prinsip-prinsip yang memiliki kekuatan hukum (Wahyuningsih et al., 2024).

Uma (2024) Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh staf instansi dalam melaksanakan pengelolaan misi agar dapat berlangsung dengan akuntabilitas.
- 2) Harus adalah suatu sistem yang bisa memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan.
- 3) Harus mampu menunjukkan sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Perlu mengarahkan perhatian pada pencapaian visi dan misi, serta mengevaluasi hasil dan manfaat yang telah diraih.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap elemen keputusan dan kebijakan pemerintah harus dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memantau, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Hingga mencapai tujuan utama dari pelaksanaan akuntabilitas yaitu untuk menemukan jawaban terhadap

apa yang harus dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadaan yang benar-benar terjadi dan membandingkannya dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi (Uma 2024). Sehingga dalam tataran politik, transparansi menyoroti pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak pemerintah publik Supyan dan Maulidiya (2024). Hal ini berlandaskan pada keyakinan bahwa memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik.

2.1.4 Good Governance

Governance merupakan alur praktik pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik (Fadillah & Sembiring 2023). Pemerintah menerapkan *Good Governance* untuk mendukung tata kerja pemerintahan agar berjalan lancar, demokrasi serta masyarakat dan pegawai saling memberikan kepercayaan, ketika melakukan kegiatan layanan publik. maka dari itu *Good Governance* merupakan pengakuan akan kesentralan struktur organisasi atau manajemen yang efektif dalam mengelola hubungan, peran, dan kebutuhan berbagai pihak terkait urusan bisnis dan pelayanan publik (Zai et al., 2022).

Penerapan Teori *Good governance* memiliki peran yang sangat penting, karena *good governance* ini merupakan sebuah konsep yang mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, beberapa prinsip penting dalam teori ini meliputi transparansi dalam proses pengambilan keputusan, penting untuk memastikan adanya akuntabilitas yang jelas, tanggung jawab yang terdefinisi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien (Afriyeni et al., 2024). Ada beberapa prinsip penting *Good Governance* yaitu (Sulfiani 2021) dalam irfansyah (2023):

- 1) Partisipasi, seluruh masyarakat berhak menyampaikan pendapat didalam forum pengambilan keputusan yang memberikan hasil baik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Aturan Hukum, hukum berlaku bagi siapapun baik yang benar atau salah, tetapi sembari memperhatikan nilai-nilai yang di tetapkan di masyarakat.

- 3) Keterbukaan/Transparansi, tugas pemerintah sebagai pemangku kepentingan untuk menyediakan dan memastikan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang tepat.
- 4) Daya tanggap, setiap pemangku kepentingan mampu untuk memberikan pelayanan yang mudah dan diarahkan kepada yang berkepentingan
- 5) Berorientasi consensus, berperilaku sebagai mediator untuk berbagai kepentingan yang berbeda demi mencapai consensus, atau dapat pula diterapkan pada berbagai kebijakan serta prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- 6) Keadilan, suatu pemerintah yang berkomitmen pada keadilan akan memberikan kesempatan yang setara bagi pria dan wanita dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup.
- 7) Efektivitas dan Efisiensi, seluruh alur kegiatan sudah disediakan arahan untuk mencapai kebutuhan lewat pemanfaatan yang baik yang berasal dari referensi yang telah disediakan.
- 8) Bervisi Strategis, pemimpin serta masyarakat yang mempunyai pandangan yang sangat luas serta berorientasi jangka panjang mengenai pelaksanaan pemerintahan yang terarah dan pengembangan sumber daya manusia.

Instansi pemerintah dalam mencapai Good governance harus menerapkan prinsip yang benar. Jika dilihat dari Prinsip-prinsip *good governance* didalam system pengelolaan keuangan publik meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Santoso et al., 2024).

2.1.5 Alokasi Anggaran Kelurahan

Kelurahan merupakan suatu wilayah yang dipimpin oleh lurah yang mana masuk dalam wilayah Kabupaten/kota. Dalam suatu wilayah Kelurahan dihuni oleh sekelompok penduduk yang memiliki tingkat Organisasi pemerintahan yang terendah, tepat di bawah camat, tidak memiliki wewenang untuk mengelola urusan internalnya sendiri. (Hizkia et al., 2021). Dalam mencapai keberhasilan pengurusan rumah tangga kelurahan seperti kegiatan pembangunan dan proses realisasi anggaran lainnya dilihat dari sejauh mana masyarakat serta aparatur pemerintah di kelurahan dalam mempersiapkan atau bekerja sama.

Anggaran kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Anggaran kelurahan diberikan sebagai tunjangan suatu Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan kebutuhan penganggaran dalam suatu kelurahan (Stevani et al., 2023). Anggaran kelurahan di salurkan untuk meningkatkan pembangunan di tingkat kelurahan. Dengan ini dana kelurahan merupakan dukungan besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat, dan penanganan kendala layanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005, Pasal 9, dinyatakan bahwa, anggaran kelurahan berasal dari:

1. APBD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan perangkat daerah lainnya. Dalam hal ini, alokasi anggaran untuk kelurahan yang bersumber dari APBD Kota harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
 - 1) Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk
 - 2) Luas wilayah
 - 3) Besaran pelimpahan tugas yang diberikan
 - 4) Jenis dan volume pelayanan
 - 5) Kondisi geografis/karakteristik wilayah.
2. Bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dukungan dari pihak ketiga
3. Sumber lain-lain yang sah serta tidak mengikat.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu (Alam et al., 2024):

- 1) Prinsip transparansi atau kebebasan, mengandung makna bahwa seluruh anggota masyarakat berhak dan memiliki Akses yang setara untuk memahami proses anggaran sangat penting, karena hal ini berkaitan langsung dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup banyak orang.
- 2) Prinsip akuntabilitas, mencerminkan tanggung jawab publik yang menegaskan pentingnya proses penganggaran, termasuk tahap perencanaan

dan penyusunan serta pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta masyarakat. Masyarakat dalam hal anggaran mereka berhak mengetahui bagaimana anggaran di kelola dan dilaporkan serta berhak meminta pertanggungjawaban dari rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

- 3) Prinsip *value for money*, penerapan prinsip ini mengacu pada penerapan tiga aspek utama didalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil
Miftakhul Qak dan Nur Halifah (2024)	Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengolaan Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya	Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa iyalah dalam pengelolaan dana Kelurahan Made telah memenuhi prinsip akuntabilitas dalam setiap tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan alokasi dana di kelurahan.
Riyadul Zannah Situmorang (2024)	Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi di Kantor Lurah Medan Sunggal	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan deskriptif. Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pengelolaan anggaran telah berada pada kategori yang baik (4,0), dengan aspek evaluasi anggaran memiliki nilai terendah (3,8). Efektivitas kinerja organisasi juga berada dalam kategori yang baik (rata-rata 4,1), dengan akuntabilitas sebagai aspek tertinggi (4,3). Hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja organisasi, dengan persamaan regresi $Y=1,23+0,68X$ $Y=1,23 + 0,68X$. Koefisien determinasi (R ²) sebesar 58%, menunjukkan bahwa 58% variasi efektivitas kinerja organisasi dipengaruhi

		oleh pengelolaan anggaran, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
Wa Ode Umiani & I Wayan Sujana (2024)	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau)	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran kelurahan se- kecamatan Betoambari Kota Baubau (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, Kelurahan Waborobo) sudah dilakukan secara cukup transparan dan akuntabel.
Hizkia Kasenda et al (2021)	Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil yang diperoleh terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan, seperti partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif, dan peningkatan kualitas penggunaan dana kelurahan. Dari penelitian ini yaitu ditemukan akuntabilitas penggunaan dana kelurahan di Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan hambatan. transparansi penggunaan dana kelurahan masih menjadi masalah yang harus diatasi.
Dian Widyantini (2024)	Akutabilitas Pada Pengolaan Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Harasasi Bogor	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan anggaran desa maupun kelurahan di beberapa wilayah tersebar di Indonesia sudah berjalan dengan akuntabilitas yang baik.
Novieta et al., (2024)	Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung	Dari hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi penggunaan dana kelurahan di Kelurahan Manembo-nembo tidak terpenuhi. Terdapat kekurangan informasi, dokumen, dan hal-hal lain terkait penggunaan dana kelurahan yang terakhir dicairkan pada tahun 2020.
Siti et al., (2023)	Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistemakuntansikeuan gan Desa Dalam Rangka	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa di Kelurahan Ranomea masih kurang lengkap dalam hal transparansi anggaran. Hal ini terlihat

	Meningkatkankinerja Pemerintah Desa Sibito	dari tidak adanya rincian anggaran yang dipajang di kantor kelurahan, yang biasanya mencakup jumlah anggaran yang diterima serta kegiatan yang dilaksanakan. Biasanya, di kantor desa, informasi ini ditampilkan melalui baliho untuk memberikan keterbukaan mengenai anggaran kepada masyarakat.
Stevani Sondakh et al., (2023)	Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado	Dari hasil penelitian, pengelolaan anggaran belum transparansi karena di kelolah oleh pemerintah kecamatan yang harusnya pengelolaan ini diketahui masyarakat baik dalam bentuk baliho atau sarana yang dapat digunakan guna meminimalisir kurangnya transparansi yang ada di kelurahan.
Ernawan & Rusmawan (2024)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dan transparansi ADD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa dipengaruhi oleh kelembagaan, kebijakan desa dan partisipasi masyarakatnya.
Charles Hutapea (2021)	Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2021 (Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola anggaran oleh pemerintah kelurahan di Kalamangan telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Namun, terdapat permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam program-program yang diadakan. Kurangnya keterlibatan warga ini mengakibatkan beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai harapan. Sebagai contoh, saat pemerintah kelurahan membuka posko untuk menerima donasi bagi warga yang menjadi korban banjir, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, sehingga mempengaruhi efektivitas program tersebut.

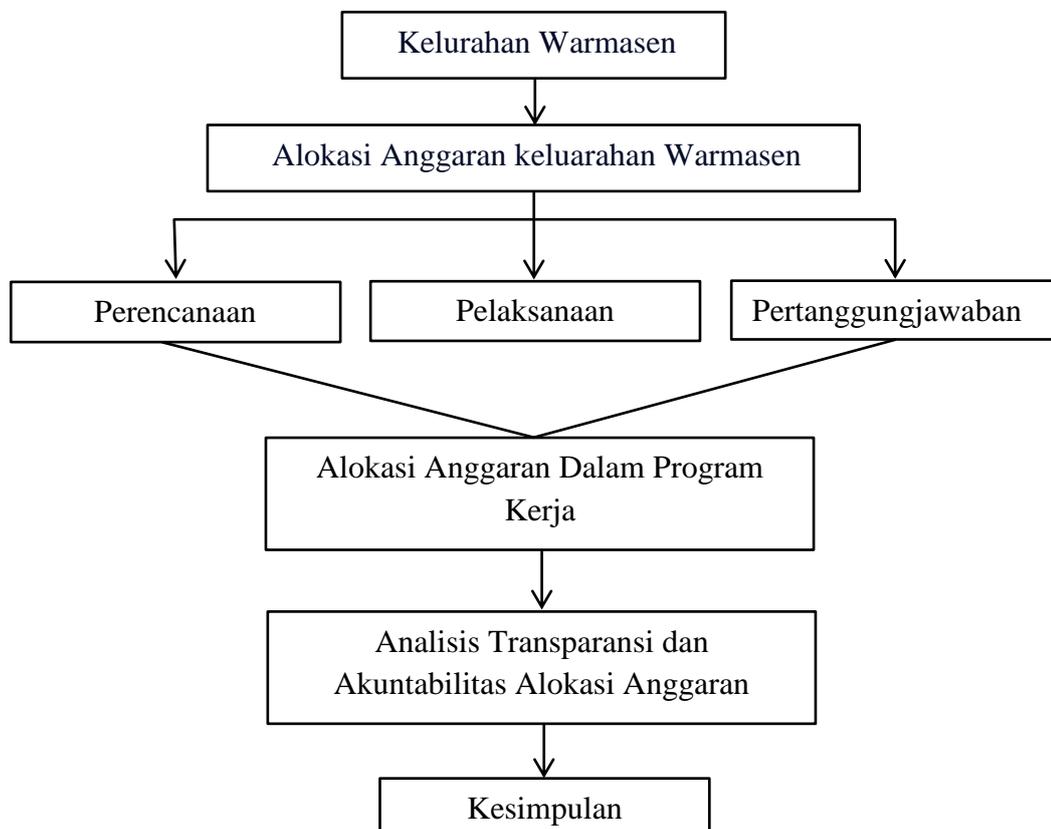
2.3 Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Research gap adalah area dalam objek penelitian yang belum dieksplorasi oleh peneliti lain terkait objek penelitian serupa, sehingga menciptakan peluang untuk

penelitian di masa depan (Mudjia Rahardjo). Melalui identifikasi *research gap*, kita dapat memahami orisinalitas penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan menganalisis hasil dari penelitian sebelumnya yang sangat relevan dengan topik yang akan diteliti. Dari hasil *Research gap* penelitian ini, beserta penelitian-penelitian sebelumnya, difokuskan pada lokasi yang diteliti terletak pada Kelurahan Warmasen Kabupaten Raja Ampat Selain itu, banyak penelitian yang cenderung menitikberatkan pada kebijakan umum tanpa mengeksplorasi bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan di tingkat local yang sistem anggarannya satu pintu. Perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat sering kali terabaikan, padahal pemahaman tentang dampak pengelolaan anggaran sangatlah penting. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengisi kekosongan yang ada dengan menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Warmasen, sekaligus menggali tantangan yang dihadapi oleh staf kelurahan sebagai pemangku kepentingan serta melihat persepsi masyarakat setempat.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian Studi Kasus (*Case Study*). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang semuanya disesuaikan dengan hasil penelitian yang diinginkan lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berperan dalam penelitian ini seperti kepala kelurahan, staf administrasi kelurahan warmase dan warga. Alih-alih memandang masalah sebagai sesuatu yang umum, metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada unsur pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau kesulitan (Rusli et al., 2021).

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Menurut Sugiyono, (2018), objek penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai yang menggambarkan seseorang, objek, atau kegiatan. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Raja Ampat yang dimana pengambilan data tepatnya berlokasi di kelurahan Warmasen. Alasan mengambil objek Kelurahan Warmasen karena sebelumnya belum ada peneliti terdahulu yang meneliti objek tersebut dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana keberhasilan anggaran dikelola oleh pemerintah setempat. Tujuannya peneliti mengambil objek ini ini untuk melihat bagaimana upaya pemerintah setempat dalam menyediakan alat penyampai informasi serta di kelurahan Warmasen belum diketahuinya tingkat akuntabilitas dan transparansi atas alokasi anggaran kelurahan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian di lakukan selama proses penelitian berlangsung hingga penelitian ini selesai dilakukan.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
		2024				2025					
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Observasi Awal										
2	Penyusunan Proposal										
3	Bimbingan										
4	Seminar Proposal										
5	Penelitian Di Lapangan										
6	Analisis Data										
7	Sidang Skripsi										
8	Revisi										

Sumber: Peneliti (2025)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan, yang kemudian dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan penulisan. Data primer ini diperoleh langsung oleh peneliti dari proses wawancara dengan seluruh informan yang telah ditentukan. Berikut langkah yang ambil dalam mengumpulkan data primer.

3.3.1.1 Observasi

Observasi adalah salah satu bagian penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati situasi dan kondisi spesifik dengan keunikan karakteristik dan teknik yang spesifik (Wani et al., 2024). Dalam penelitian ini dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

3.3.1.2 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menghasilkan data serta mengetahui data yang sebenarnya dari pengolah. Dalam proses wawancara di butuhkan pihak yang sudah memiliki pengetahuan di bidangnya dan tentunya berpartisipasi dalam mendapatkan informasi serta ahli dalam pelaksanaan tugasnya. Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh penting yaitu kepala lurah, staf keuangan serta beberapa warga. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan kepada informan dengan harapan mendapatkan jawaban yang diinginkan.

Tabel 3. 2 Biodata Informan

No	Nama	Jabatan
1	Wansawiyai	Kasubag Program
2	Anwak Kapitan Lau	Sekretaris Distrik
3	Hamida Mambraku	Ketua kelurahan warmasen
4	Ahmad Slayar	Ketua Rt.05 warmasen
5	Imanuela Materda Reba	Ibu Rumah Tangga

Sumber: Peneliti (2025)

3.3.2 Data Sekunder

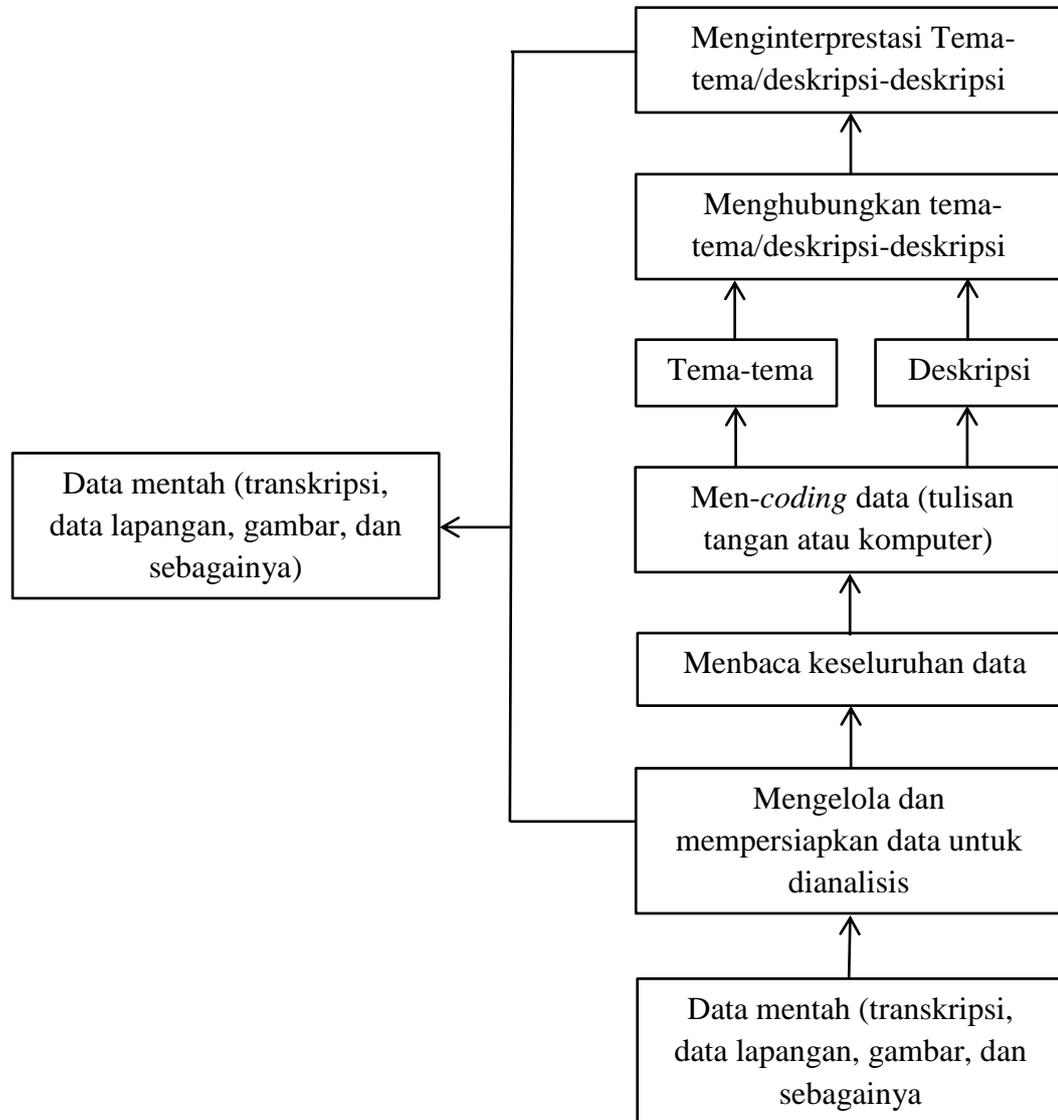
Data sekunder adalah informasi tambahan yang diperoleh dari berbagai kantor, instansi, dan lembaga terkait, serta dari literatur yang relevan (Wardah & Susi, 2025). Data ini mencakup sumber-sumber seperti jurnal, buku, perpustakaan, dan referensi lain yang sesuai dengan judul penelitian. Secara umum, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen menjadi elemen penting yang melengkapi metode observasi dan wawancara untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian (Bagus 2023).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah Usaha menemukan dan mengganti dengan sistematis data hasil wawancara, observasi, dan lainnya sehingga peneliti dapat memahami tentang kasus yang sedang diteliti dan dapat disajikan untuk temuan yang akan

datang Ahmad & Muslimah (2021). Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Gambar 3. 1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif



(Cresswell 2013)

Berdasarkan gambar 3.1 teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teknik analisis data Cresswell (2013) yang dijelaskan sebagai berikut.

Langkah 1. mempersiapkan data mentah yang dihasilkan dari proses penelitian lapangan, data ini diperoleh dari proses wawancara, membaca materi, mengetik

data lapangan, atau memilih kemudian menyusun data yang sudah disiapkan kedalam jenis dan kelompoknya.

Langkah 2, membaca seluruh data yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada tahap ini yaitu memaknai informasi yang sudah diperoleh ditahap sebelumnya serta merefleksikan seluruh informasi yang sudah dikumpulkan. Peneliti melakukan tahap ini dengan cara menyiapkan catatan-catatan khusus atau umum dari data yang di peroleh.

Langkah 3, berikutnya melakukan *coding* dari semua data yang sudah di peroleh. Dalam proses *coding* peneliti mengumpulkan bagian teks atau gambar. Dalam proses *coding* peneliti menandai bagian-bagian yang penting.

Langkah 4, bagian ini kemudian menerapkan proses *coding* untuk menjelaskan ranah, partisipan, serta tema yang akan dianalisis. Tahap membuat *coding* untuk mendeskripsikan seluruh data ini, kemudian mengalisis data penelitian.

Langkah 5, dari proses *coding* data ditemukanlah tema-tema dan deskripsi yang kemudian akan disajikan kembali dalam laporan.

Langkah 6, dilangkah ini kemudian menghubungkan tema-tema dan deskripsi yang sudah ditemukan dari hasil *coding* disusun hingga menjadi suatu kalimat yang siap untuk di paparkan.

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Ramdhani dan Saputro (2025) Uji validitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat dianggap valid atau tidak sedangkan Uji reliabilitas adalah metode yang digunakan untuk mengukur konsistensi, serta untuk menguji tingkat keandalannya. Validitas mengacu pada kemampuan suatu instrumen untuk dengan tepat mengukur apa yang ingin diukur. Umumnya, validitas diuji melalui analisis korelasi total item atau melalui penilaian oleh para ahli. Sementara itu, reliabilitas berfokus pada seberapa konsisten hasil yang diperoleh dari suatu alat ketika digunakan secara berulang (Aryansyah & Afdal 2025). Kedua pengujian ini sangat penting untuk memastikan kualitas data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian menjadi dapat dipercaya dan diandalkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Kelurahan Warmasen merupakan salah satu dari kelurahan dibawah naungan distrik kota waisai yang terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 7 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan ini terletak kurang lebih 1 km dari pusat pemerintahan kabupaten dan distrik, sehingga mudah dijangkau dari pusat kota Waisai. Kelurahan Warmasen selaku instansi terendah dari instansi pemerintah yang tugasnya melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan, pembangunan, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasi di Kelurahan Warmasen dipimpin oleh seorang lurah. Dari segi lokasi, Kelurahan Warmasen berada di area pantai yang penting dan merupakan bagian dari pusat administrasi Kabupaten Raja Ampat. Secara geografis Kelurahan Warmasen terletak pada koordinal berada sedikit di selatan garis khatulistiwa 130.8368413 dan berada di sebelah timur garis bujur nol -0.4033039.

Gambar 4. 1 kantor kelurahan Warmasen



Sumber: Google Maps (2025)

4.1.2 Kondisi Sosial

Penduduk di daerah Kelurahan Warmasen sebagian besar terdiri dari suku asli Papua serta imigran dari Maluku, Sulawesi, dan Jawa yang telah lama tinggal dan berinteraksi dalam kehidupan sosial setempat. Keberagaman ini menjadikan Warmasen sebagai kelurahan yang memiliki kekayaan budaya, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menyamakan pandangan tentang pembangunan dan pengelolaan dana publik. Masyarakat di Kelurahan Warmasen hidup rukun satu sama lain, di mana mayoritas penduduk bekerja sebagai pegawai negeri, nelayan, petani, buruh bangunan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Interaksi sosial di kelurahan ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi gotong royong yang masih dijunjung tinggi. Masyarakat Kelurahan Warmasen masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dilihat dari aktifnya masyarakat dalam kegiatan adat, keagamaan, maupun kegiatan sosial lainnya.

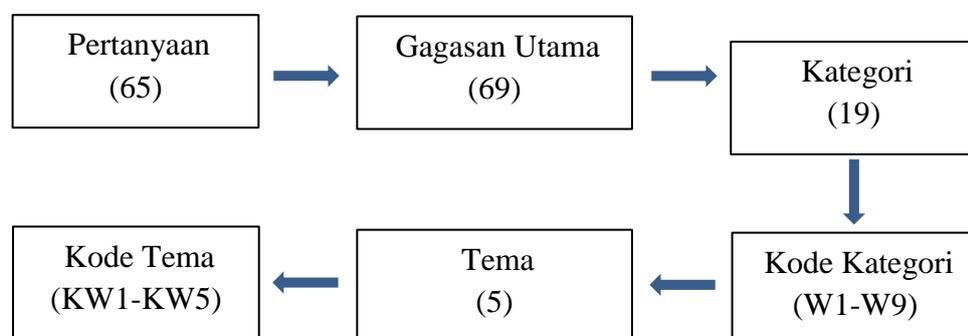
4.1.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Warmasen

Jumlah penduduk Kelurahan Warmasen yaitu 2.586 jiwa terdiri dari laki-laki 1.366 jiwa dan perempuan 1.220 jiwa.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang didapat melalui proses pengumpulan dan analisis informasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di Kelurahan Warmasen, Kabupaten Raja Ampat. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada lima informan yang dipilih secara purposive berdasarkan peran, pengalaman, dan partisipasi mereka dalam proses pengelolaan anggaran di tingkat kelurahan.

Gambar 4. 2 Analisis Data Creswell



Analisis Data wawancara (Cresswell;2014:263)

Proses wawancara dilaksanakan secara langsung dengan metode wawancara yang terstruktur, di mana setiap informan diwawancarai satu kali, sehingga total ada lima sesi wawancara dengan total 13 pertanyaan untuk setiap informan, menjadikan total pertanyaan sebanyak 65 pertanyaan. Setelah seruh data diperoleh dari setiap informan kemudia tahap berikutnya melakukan analisis analisis data. Langkah awal adalah meneliti kembali keseluruhan transkrip wawancara agar dapat memahami sepenuhnya isi dari setiap respons informan. Dari kegiatan ini, peneliti memperoleh banyak informasi berarti yang kemudian diringkas menjadi ide pokok, yaitu inti dari pernyataan informan yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian. Ide pokok ini memudahkan peneliti dalam menyaring bagian-bagian penting dari jawaban informan tanpa mengubah arti atau konteksnya. Berikutnya mengategorikan gagasan-gagasan utama menjadi sembilan kategori, yang masing-masing diberi kode W1-W9. Tahap berikutnya mengembangkan tema-tema besar yang memiliki jangkauan lebih luas dan mencerminkan esensi dari hasil penelitian ini secara keseluruhan. Dari sembilan kategori yang telah ada, peneliti berhasil menentukan lima tema, yang diberikan kode KW1-KW5. Setiap kategori mencerminkan pembahasan tertentu yang sering muncul dalam jawaban para informan, seperti partisipasi masyarakat, akses terhadap informasi anggaran, hingga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Peneliti juga memberikan kode untuk setiap informan yaitu K1-K5 untuk menjaga kerahasiaan serta mempermudah proses analisis. Setelah menyelesaikan analisis data seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil penelitian yang disajikan berdasarkan tema-tema utama yang teridentifikasi dari kategori yang suda di tentukan.

4.2.1 Transparansi Informasi Publik

Transparasi Informasi publik merujuk pada sikap terbuka lembaga publik dalam transparansi seluruh informasi yang berkaitan dengan publik atau masyarakat, tujuannya untuk meningkatkan partisipasi, pengawasan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Tujuan dari hal ini ialah untuk menghindari tindakan korupsi, mebangun kepercayaan masyarakat, dan juga memastikan hak

setiap individu untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini lembaga publik dituntut selalu transparan dalam setiap tindakan yang diambil.

Tabel 4. 1 Transparansi Informasi Publik

Kategori	KK	Tema	KT	Tipe Kode
Transparansi Anggaran Kelurahan	W1	Transparansi Informasi Publik	KW1	Deduktif

Sumber: Data peneliti 2025

4.2.1.1 Transparansi Anggaran Kelurahan

Transparansi anggaran kelurahan ini perlu diterapkandalam instansi pemerintah untuk mengukur sejauh mana informasi terkait anggaran serta penggunaan anggaran tersampaikan secara terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. sesluruh informasi yang berkaitan dengan anggaran harus berjalan secara transparan. Anggaran keluarhan warmasen cukup transparan tapi untuk beberapa yang berkepentingan saja seperti dijelaskan oleh bapa ML selaku sekretaris distrik.

“anggaran pada distrik kota waisai dia sangat transparan terkait badan pemberitahuan terkait DPA disampaikan kepada seluruh staf BKD ee apa staf-staf yang ada di distrik bahkan di kelurahan dengan cara aa dengan cara apa DPA yang di terima diserahkan ke penanggung jawab tentu ibu lurah mereka sendiri”(K2,KW1,W1)

Daftar Pelaksanaan Anggaran yang diterima distrik disampaikan kepada seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD), staf Distrik serta kelurahan untuk kemudian diserahkan kepada penanggungjawab anggaran yakni masing-masing lurah. Hal ini bahwa anggaran kelurahan cukup transparan di lingkungan instansi atau yang berkepentingan saja tidak untuk publik. Sebagaimana di jelaskan juga oleh ketua kelurahan warmasen terkait anggaran belum diterapkan di kantor distrik ataupun kelurahan ibu HM mengungkapkan

“Kalau itu selama ini belum ada (Ibu HM menjelaskan bahwa kelurahan belum menyediakan media informasi seperti Website maupun papan informasi)” (K3,KW1,W1).

Keluarahan belum menyediakan media informasi anggaran karena merasa anggaran yang di terima oleh kelurahan hanya untuk keperluan operasional kantor sebagaimana di didukung dengan pernyataan Ibu Kasubag

“di distrik ini biasanya kami tidak bikin begitu karna kami hanya operasional kantor tidak untuk kegiatan kemasyarakatan kita hanya operasional kantor saja jadi kita anggarkan ke kelurahan jadi lurah itu bisa macam ATK makan minum itu saja itu saja jadi untuk ke masyarakat itu tidak Uuu kasian jadi tidak untuk ke masyarakat karna untuk kedalam operasional kantor jadi tong tidak perlu bikin sesatu laporan ke media ke masyarakat” (K1,KW1,W1)

Anggaran yang distrik serahkan kepada keluarahan hanya untuk keperluan operasional dalam kantor dan kegiatan kemasyarakatan biasa jadi distrik dan keluarahan merasa tidak perlu mempublikasikan anggaran yang sudah direalisasikan. Bahkan laporan hasil realisasi yang disusun distrik tidak transparan kepada kantor dan masyarakat sebagaimana ungkapan oleh ibu HM.

“setiap pencairan yang kita dapat itu sekian karna kita punya DPakan tidak di foto copy” (K3,KW1,W1).

Laporang realisasi anggaran yang disusun distrik tidak transparansi kepada pihak kelurahan misalnya laporan bentuk fisik. Bahkan dari masyarakat sebagai penerima manfaat dari anggaran yang sudah dianggarkan tidak pernah tau dan terlibat dalam realisasi anggaran. Kelurahan warnasen tidak melakukan diskusi atau pertemuan warga terkait alokasi anggaran sebagaimana diungkapkan oleh bapa AS

“dari kelurahan tidak pernah macam sosialisasi kalau turun ke warga untuk kasi keluar anggaran sekian sekian yang kita gunakan tidak ada juga” (K4,KW1,W1).

Perangkat kelurahan yaitu ketua RT berperan penting dalam pelaksanaan anggaran tidak pernah ikut dalam musyawarah anggaran. Masyarakat kesulitan memperoleh informasi anggaran karena kelurahan tidak pernah melakukan sosialisasi terkait penggunaan anggaran. Kelurahan dan masyarakat tidak pernah melakukan Musrenbangkel. Jadi kesimpulanya dalam Transparansi anggaran hanya terjadi di dalam instansi seperti staf distrik serta kelurahan hanya

mengetahui jumlah anggaran yang diterima sedangkan masyarakat tidak mengetahui sama-sekali proses anggaran mulai dari penyusunan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

4.2.2 Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas anggaran merupakan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah, yang mengharuskan agar setiap pemanfaatan anggaran dilakukan dengan cara yang jelas, memenuhi sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam hal ini instansi pemerintah wajib menyusun seluruh kegiatan realisasi anggaran secara terbuka dan sesuai peraturan yang berlaku. Tujuannya untuk membangun kepercayaan seluruh masyarakat untuk menciptakan kepercayaan publik dan memastikan setiap anggaran yang di gunakan memberikan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Tabel 4. 2 Akuntabilitas Anggaran

Kategori	KK	Tema	KT	Tipe Kode
Penyusunan Anggaran Sesuai Standar Akuntabilitas	W2	Akuntabilitas Anggaran	KW2	Deduktif

Sumber: Data peneliti 2025

4.2.2.1 Penyusunan Anggaran Sesuai Standar Akuntabilitas

Penyusunan anggaran disetiap instansi pemerintah harus sesuai dengan standar akuntabilitas yang berlaku. Individu yang bertugas harus mematuhi dan mengamalkan setiap peraturan yang ada demi kepercayaan publik. Penyusunan anggaran kelurahan yang diterapkan di distrik kota waisai sudah sesuai dengan standar akuntabilitas yang berlaku sebagaimana ditegaskan oleh kasubag program yang menjawab pertanyaan dari peneliti “*Dalam penyusunan anggaran apakah sudah memenuhi standard akuntabilitas anggaran?*” ibu W selaku kasubag menjawab

“Iya semuanya sesuai dengan penyusunan anggaran itu sudah sesuai” (K1,KW2,W2).

Proses penyusunan anggaran kelurahan sudah berjalan dengan baik dan disusun sesuai standar akuntabilitas yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan

anggaran yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya yang seperti diungkapkan oleh kasubag ibu W.

“sesuai dari tahun ke tahun itu sudah sesuai sesuai dengan anggaran” (K1, KW, W2).

Penyusunan laporan yang di susun dari tahun ke-tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah di patuhi oleh kasubag selaku penyusun laporan realisasi anggaran. Anggaran yang distrik terima di serahkan ke kelurahan untuk kemudian di alokasikan sebagai bentuk pelaksanaa anggaran. Jadi dapat di simpulkan bahwa penyusunan laporan alokasi anggaran di kelurahan warmasen sudah di susun sesuai standar akuntabilitas dilihat dari perencanaan oleh distrik yang memperhitungkan terlebih dahulu anggaran dan pelaksanaanya oleh kelurahan warmasen.

4.2.3 Pertanggungjawaban Anggaran

Pertanggungjawaban dalam segala kegiatan merupakan bentuk aktifitas yang diterapkan oleh suatu individu untuk membuktikan bahwa suatu individu bertanggungjawab atas segala yang dikerjakan dan bertanggungjawab atas apa yang di laksanakan.

Tabel 4. 3 Pertanggungjawaban Anggaran

Kategori	KK	Tema	KT	Tipe Kode
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran	W3	Pertanggungjawaban Anggaran	KW3	Deduktif

Sumber: Data peneliti 2025

4.2.3.1 Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran

Pertanggungjawaban anggaran ialah bentuk pembuktian dari suatu instansi selaku pengguna anggaran yang kemudia dipertanggungjawabkan kepada bagian yang bertugas untuk melaporkan hasil realisasi anggaran tersebut. Anggaran yang sudah direalisasikan kemudia dilaporkan untuk membuktikan transparansi anggaran. Anggaran yang direalisasikan kepada kelurahan warmasen setelah di realisasikan kemudian dipertanggungjawabkan seperti ungkapan bapa ML

“dalam proses pelaporan uang yang kita berikan kita minta pertanggungjawabannya sesuai dengan jumlah besaran uang yang di berikan

berupa nota-nota *pertanggungjawaban belanja hasil belanja mereka hasil belanja mereka serakan ke kasubang program dan keuangan nah beliau lah yang bertugas untuk menyusun segala bentuk laporan*” (K2, KW3, W3)

Kasubag program selaku penyusun laporan realisasi anggaran kelurahan kemudian meminta bukti seperti nota-nota dengan tujuan untuk melihat bahwa kelurahan warmasen sudah menjalankan kewajiban dan kemudian mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah di realisasikan. Kelurahan juga harus selalu melaporkan seluruh penggunaan keuangan seperti diungkapkan ulang oleh bapa ML

“*lurah-lurah punya tanggungjawab melaporkan penggunaan keuangan tersebut*”. (K2, KW3, W3)

Tanggungjawab melaporkan anggaran wajib dipatuhi oleh kelurahan saat anggaran sudah terealisasi. Melaporkan dan memberikan bukti penggunaan anggaran kepada pihak penyusun laporan wajib dipatuhi dan diamalkan oleh kelurahan saat setelah merealisasikan anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelurahan warmasen sudah mempertanggungjawabkan anggaran yang direalisasikan.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran merupakan langkah untuk menempatkan dana ke berbagai program, aktivitas, atau divisi kerja dengan mempertimbangkan prioritas, kebutuhan, dan kapasitas keuangan yang ada. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk memastikan anggaran bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan pembangunan dan layanan publik.

Tabel 4. 4 Alokasi Anggaran

Kategori	KK	Tema	KT	Tipe Kode
Partisipasi Alokasi Anggaran	W4	Alokasi Anggaran	KW4	Deduktif
Realisasi Anggaran	W5			Deduktif
Anggaran Operasional	W6			Induktif

Sumber: Data peneliti 2025

4.2.4.1 Partisipasi Alokasi Anggaran

Partisipasi alokasi anggaran adalah bentuk keterlibatan perangkat lurah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait reallisasi anggaran. partisipasi alokasi anggaran ini berguna untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran dan distribusi yang lebih merata yang realisasinya secara tepat. Partispasi alokasi anggaran di kelurahan warmasen belum cukup partisipan saat penentuan alokasi anggaran sebagaimana ungkapan ibu HM

*“kalau untuk waktu itu **anggarannya itu tidak jujur** (Ibu HM menjelaskan terkait penentuan alokasi anggaran masyarakat tidak ikut terlibat)”.*(K3,KW4,W4)

Saat menentukan alokasi anggaran perangkat kelurahan dan masyarakat tidak ikut terlibat dalam proses penentuannya. Ini menjadikan perangkat kelurahan kurang transparan terhadap masyarakat. Bahkan tidak ada pertemuan yang diselenggarakan oleh kelurahan terkait anggaran sebagaimana hal ini di ungkapkan oleh ketua RT 05 bapa AS

*“**tidak ada pertemuan tentang anggaran macam dana ostsus dana ini to tidak ada juga tidak ada pertemuan jadi bagaiman kita mau sampaikan ke masyarakat**”* (K4,KW4,W4)

Tidak adanya pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan untuk membahas terkait alokasi anggaran menjadikan aparat kelurahan kebingungan dalam menyampaikan kepada masyarakat yang diawasinya. Pengambilan keputusan bersama untuk penentuan alokasi anggaran sangat penting dalam melibatkan perangkat masyarakat karena masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus masyarakat yang merasakan apa yang perlu ditingkatkan dalam lingkungan kelurahan. Jadi dapat di simpulkan partisipasi alokasi anggaran di kelurahan warmasen masih belum cukup partisipan.

4.2.4.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran ialah anggaran yang sudah diterima oleh pihak kelurahan yang kemudian dipergunakan untuk menujung kebutuhan selama kegiatan dalam dan luar kantor untuk membantu dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses realisasi anggaran dalam kelurahan warmasen sudah cukup untuk membantu dalam kegiatan dalam kantor seperti diungkapkan oleh kasubag

*“masing-masing kelurahan yang kelola untuk mungkin masyarakat setempat ya mungkin dalam bentuk ee **kebersihan ke masing-masing RT itu nanti dari masing-masing kelurahan ee lurah yaa dianggarkan untuk masing-masing rt untuk dia punya kebersihan**” (K1,KW4,W5)*

Anggaran yang sudah kelurahan terima dari distrik kemudia direalisasikan untuk menunjang kegiatan di lingkungan masyarakat seperti kegiatan kebersihan. Saat kelurahan warmasen merealisasikan anggaran kelurahan ikut melibatkan masyarakat seperti diungkapkan oleh ibu HM

*“pertemu pertemuan Terus maksudnya kita tolong ke lapangan untuk **kerjasama untuk kerja bakti**” (K3,KW4,W5)*

Kelurahan warmasen saat merealisasikan anggaran selalu melibatkan masyarakat mengajak masyarakat seperti kegiatan kerja bakti. Kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi kenyamanan masyarakat saat menjalani aktivitas dilingkungan kelurahan. Serta kegiatan untuk merealisasikan anggaran tersebut juga disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sebagaimana dirasakan oleh ibu MM yaitu

*“Iya kalau **dapat bantuan** pernah dapat dari kelurahan” (K3,KW4,W5).*

Masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan yang bersal dari kelurahan berupa sembako. Realisasi anggaran dalam bentuk pemberian bantuan ini dapat mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan realisasi anggaran di kelurahan warmasen sangat membangun dan angkat meberi manfaat kepada kemajuan lingkungan dan masyarakat.

4.2.4.3 Anggaran operasional kantor

Anggaran operasional kantor adalah dana yang ditentukan untuk mendukung kelangsungan aktivitas harian di suatu lembaga atau unit kerja. Tujuan dari anggaran operasional ini agar kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan baik. Anggaran yang distrik salurkan untuk kelurahan cukup untuk memenuhi kegiatan operasional sebagaiman di uangkan oleh bapa ML

*“**pembayaran listrik ee makan minum di kantor penyediaan ATK kalau bisa memulir di back up degan kebersihan kantor dan yang lain-lain**” (K2,KW4,W6)*

Jelas anggaran yang diterima oleh kelurahan hanya untuk menunjang kegiatan dalam kantor seperti penyediaan ATK, konsumsi serta kebersihan kantor. Bahkan anggaran yang kelurahan terima hanya masih sangat kurang seperti diungkapkan oleh ibu lurah HM

“kita dapat cuma berapa persen bahkan kita mau beli ATK saja tidak bisa terpaksa kita utang nanti cair kedua aa itu baru kita tutup-tutup” (K3, KW4, W6)

Anggaran yang kelurahan terima untuk menunjang keperluan kantor bahkan kurang masih belum cukup untuk kegiatan operasional kantor. Pihak kelurahan mengambil kebijakan dengan mengutang beberapa keperluan alat tulis kantor dan pendanaan berikutnya baru utang tersebut di bayarkan. Dapat di simpulkan bahwa anggaran yang kelurahan terima untuk menunjang kegiatan operasional kantor seperti penyediaan alat tulis kantor, rehab kantor dan sedikit konsumsi untuk menciptakan kegiatan pelayanan yang aman tanpa kendala.

4.2.5 Kendala Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas alokasi Anggaran

Kendala dalam mewujudkan Transparansi dan akuntabilitas anggaran ialah suatu maslaah tidak terduga yang dihadapi saat proses kegiatan berjalan masalah ini bisa datang kapan saja saat diluar kendali suatu individu. Kendala dapat diatasi jika sudah ditemukan solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Bannyak kendala saat proses alokasi anggaran di kelurahan warnasen selama proses alokasi anggaran di realisasikan.

Tabel 4. 5 Kendala Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas

Kategori	KK	Tema	KT	Tipe Kode
Pemotongan Anggaran Kelurahan	W7	Kendala Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran	KW5	Induktif
Pelaporan Anggaran	W8			Deduktif
Penyusunan DPA	W9			Induktif

Sumber: Data peneliti 2025

4.2.5.1 Pemotongan Anggaran Kelurahan

Pemotongan anggaran adalah bentuk kebijakan yang diambil saat instansi mengalami hal yang membutuhkan dana dadakan. Pemotongan anggaran ini dapat berakibat fatal saat anggaran yang dipotong tidak bisa memenuhi kebutuhan yang

sudah direncanakan. Saat proses realisasi anggaran di distrik dan kelurahan warmasen Anggaran operasional kelurahan sering kali diungkapkan oleh bapa ML
*“sumbangan masuk berupa proposal bantuan sehingga porsinya kan berkurang aa sehingga kasian kepala distrik **mengambil satu kebijakan mengurangi porsi anggaran**” (K2,KW5,W7)*

Saat ada masyarakat yang memasukan proposal bantuan disitulah pihak distrik memangkas anggaran operasional untuk membantu masyarakat yang mengusulkan proposal bantuan. Anggaran kelurahan juga kerap dialokasikan untuk membantu pengobatan masyarakat seperti diungkapkan oleh bapa ML
*“sakit ini bukan hanya kita punya anggota kantor masyarakat yang di luar juga kalau sakit mungkin karna kenal karna kerabatnya ada di distrik dia **datang ke sini minta bantu** mau tidak mau pa distrik yang kerjakan” (K2,KW5,W7)*

Masyarakat yang sakit dan membutuhkan dana untuk berobat mereka datang menghadap di kantor distrik untuk meminta bantuan dana berobat. Anggaran lainnya juga dipotong untuk keperluan duka dari masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh bapa ML

*“awal tahun **tu tiba-tiba berita duka masuk** mau pencairan di mana ini masa libur pa distrik yang bicarakan bendahara ambil dulu kita” (K2,KW5,W7).*

Seluruh keperluan masyarakat yang mendesak yang dimana distrik harus mengambil kebijakan untuk memangkas anggaran operasional kelurahan. Kendal-kendala itulah yang menjadikan kelurahan menerima anggaran yang tidak mencukupi keperluan operasional kantor.

4.2.5.2 Keterlambatan Pelaporan Anggaran

Keterlambatan pelaporan anggaran ini dapat menghambata proses pertanggungjawaban oleh pihak penanggungjawab laporan. Saat anggaran sudah direalisasikan oleh keluhan saatnya kelurahan melaporkan dengan membawa bukti nota-nota. Kelurahan warmasen harus melaporkan anggaran yang sudah direalisasikan seperti diungkapkan oleh bapa ML

*“kalau macam kita apa minta untuk segera masukan laporan ada keterlambatan satu atau dua hari hanya **keterlambatan dari kelurahan untuk memberikan laporan ke distrik**” (K2,KW5,W8)*

Keterlambatan saat pelaporan anggaran oleh kelurahan warmasen mengakibatkan pihak distrik selaku penyusun laporan menjadi terhambat dalam menyusun laporan realisasi anggaran. Saat anggaran sudah direalisasikan menjadi kewajiban suatu kelurahan untuk melaporkan agar tidak terjadi kendala dalam penyusunan anggaran oleh pihak penyusun.

4.2.5.3 Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksana Anggaran merupakan dokumen formal yang dipakai oleh lembaga pemerintah sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas dan memanfaatkan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Dalam DPA tertera rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, estimasi biaya yang diperlukan, serta sumber dana yang akan digunakan. Dokumen ini sangat penting karena menjadi landasan agar penggunaan anggaran berlangsung sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan DPA ini berfungsi sebagai panduan untuk pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian dalam penggunaan anggaran, serta sebagai landasan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. Distrik kota waisai belum menyusun DPA sendiri yang menyebabkan instansi kesusahan dalam menentukan anggaran untuk merealisasikan kedalam kelurahan sebagaimana di ungkakan oleh bapa ML

“dalam berbicara pakai transparansi sampai dengan akuntabilitas anggaran kalau bisa distrik itu sendiri yang menyusun DPA ” (K2,KW5,W9)

Distrik sebagai pengelola anggaran kelurahan atau satu pintu kelurahan belum menyusun DPA sangat kesusahaan menentukan anggaran yang dibutuhkan suatu kelurahan. Menjadikan distrik dan kelurahan susah untuk mempertanggungjawabkan serta transparansi terhadap anggaran karena bukan instansi atau kelurahan sendiri yang menyusun DPA. Hal ini juga diungkapkan oleh kepala kelurahan warmasen HM

“kalau seandainya saya sendiri yang pegang DPA itu saya bisa atur ade tapi bukan kita yang pegang DPA ” (K3,KW5,W9)

Kelurahan sendiri tidak menyusun DPA sehingga kelurahan tidak ada kendali penuh atas anggaran yang di terima. DPA tidak dipegang oleh instansi distri dan kelurahann sehingga menjadikan distrik dan kelurahan kesulitan dalam

mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Seandainya DPA dipegang oleh Distrik dan kelurahan sendiri bisa dengan mudah instansi tersebut mengelola dan mengalokasikan seluruh kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis

Transparansi Informasi publik merujuk pada sikap terbuka lembaga publik dalam transparansi seluruh informasi yang berkaitan dengan publik atau masyarakat, tujuannya untuk meningkatkan partisipasi, pengawasan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Rizal et al, (2024) Keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini lembaga publik dituntut selalu transparan dalam setiap tindakan yang diambil. Dari hasil penelitian di Kelurahan Warmasen ditemukan bahwa kelurahan belum menyediakan media informasi seperti papan informasi, baliho, website dan tidak melakukan pertemuan warga. Disamping itu informasi anggaran hanya di ketahui oleh staf yang ada dilingkungan instansi sedangkan untuk masyarakat belum ikut terlibat. Masyarakat umum atau publik belum memiliki akses terhadap informasi yang jelas serta tidak dilakukan musyawarah terkait penentuan anggaran. Aspuri (2024) Kurangnya akses untuk publik terhadap anggaran serta minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa merupakan tantangan signifikan dalam mewujudkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Miftakhul & Nur (2024) yang menyatakan bahwa di Kelurahan Made telah menerapkan prinsip keterbukaan meskipun penyampaian informasi mengenai pengelolaan dana kelurahan belum sepenuhnya efektif. Hal ini terjadi karena Kelurahan Made belum memanfaatkan secara maksimal website kelurahan, termasuk kurangnya banner atau papan informasi yang bisa diakses di kelurahan tersebut.

Akuntabilitas anggaran merupakan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah, yang mengharuskan agar setiap pemanfaatan anggaran dilakukan dengan cara yang jelas, memenuhi sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam hal ini instansi pemerintah

wajib menyusun seluruh kegiatan realisasi anggaran secara terbuka dan sesuai peraturan yang berlaku.(tambahkan penelitian terdahulu). Dari hasil wawancara dengan kasubag ditemukan bahwa penyusunan dan pelaporan suda dilakukan sesuai dengan peraturan yangberlaku. Diketahui bahwa laporan anggaran lebih sering disampaikan secara internal kepada pihak distrik, bukan kepada masyarakat secara langsung. Di sisi lain, masyarakat hanya mengetahui jenis kegiatan tanpa mengetahui rincian anggaran atau cara pertanggungjawabannya. Penelitian ini sejalan dengan peelitian sebelumnya oleh Noviana (2023) dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bendo menunjukkan bahwa meskipun pelaporan anggaran telah dilakukan kepada pihak yang berwenang (kecamatan/kabupaten), akuntabilitas kepada masyarakat masih kurang terpenuhi, karena laporan realisasi tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh publik.

Telah disediakan dana untuk berbagai program kegiatan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Namun, dalam pelaksanaannya, proses penyaluran anggaran tersebut belum sepenuhnya berlangsung secara terbuka dan melibatkan masyarakat, sehingga masih kurang optimal dalam mencerminkan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Mayoritas keputusan mengenai penggunaan anggaran masih dikuasai oleh pihak kelurahan, bukan berdasarkan masukan yang terbuka dari masyarakat. hasilnya kelurahan sudah berupaya menjaolankan program untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas hal itu belum sepenuhnya tercapain karena beum melibatkan masyarakat. penelitian oleh Saragih et al, (2024) yang menyatakan betapa pentingnya akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran supaya transparansi dan akuntabilitas benar-benar terwujud.

4.4 Keterkaitan Hasil Analisis 2Dengan Teori Agensi

Hubungan kontraktual dapat berjalan dengan baik, maka dari itu *principal* akan memberikan kewenangan dalam penyerahan keputusan kepada agen (Putri, Sudiana, & Putra, 2021). Pemerintah disini sebagai sebagai agen menjalankan wewenang di suatu instansi dan masyarakat sebagai principal yang berhak untuk melihat nilai pertanggung jawaban kinerja suatu pemerintah. Teori ini

menekankan pentingnya transparansi untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas agen kepada principal atau masyarakat.

Anggaran yang di kelola di kelurahan warmasen belum cukup transparan dilihat dari instansi pemerintah distrik dan kelurahan belum menerapkan prinsip-prinsip teori agensi secara optimal, yang mana kelurahan belum menyediakan media informasi seperti papan informasi, website serta tidak mengadakan musrenbangkel terkait pengambilan keputusan anggaran. Hal ini menandakan kegagalan agen dalam menjalankan kewajiban terhadap prinsip principal yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi serta kemungkinan terjadi konflik kepentingan.

Dalam hal penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran kelurahan warmasen, dilihat dari penyusunan anggaran dari tahun ke tahun yang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas serta pertanggungjawaban oleh kelurahan terhadap realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan yang kemudian dilaporkan dengan bukti-bukti yang valid kepada agen yang lebih tinggi yakni distrik. Namun, dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses pertanggungjawaban serta pengambilan keputusan sehingga penerapan teori agensi belum secara penuh efektif diterapkan.

Proses alokasi anggaran di kelurahan warmasen masyarakat sebagai principal belum secara aktif terlibat hal ini menyebabkan prinsip partisipatif dalam agen belum terimplementasi secara optimal. Dari hasil temuan di lapangan tahapan realisasi anggaran masyarakat sesekali terlibat tetapi belum sepenuhnya. Serta anggaran yang belum mencukupi atas kebutuhan kelurahan dikarenakan DPA tidak dikelola langsung oleh distrik dan kelurahan ini menjadi keterbatasan yang sangat berakibat atas ketidak sesuaian anggaran yang akan terealisasi di lapangan. Oleh karena itu, koneksi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan keterlibatan principal, transparansi informasi, dan perbaikan dalam sistem pelaporan anggaran oleh agen. Dapat disimpulkan bahwa di kelurahan warmasen saat melaksanakan aloaksi anggaran untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya menerapkan prinsip teori agensi.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Hasil penelitian di kelurahan warmasen ditemukan saat kelurahan mengalokasikan anggaran kelurahan belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kelurahan warmasen belum menyediakan media informasi seperti papan informasi, website dan tidak melaksanakan musyawarah untuk pengambilan keputusan anggaran. Sedangkan dari prinsip penerapan akuntabilitas anggaran kelurahan sudah cukup bertanggungjawab dengan anggaran yang di realisasikan dengan melaporkan hasil realisasi dengan meyerahkan bukti pelaksanaan kepada distrik sebagai penyusun laporan alokasi anggaran. Tingkat transparansi dan akuntabilitas pengolaan anggaran Kelurahan Warmasen Kabupaten Raja Ampat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban belum sepenuhnya diterapkan sesuai harapan dalam konteks tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
- 2) Pemerintah Kelurahan Warmasen telah mendistribusikan atau menetapkan anggaran untuk berbagai program kerja, khususnya untuk aktivitas fisik seperti menjaga kebersihan lingkungan kelurahan. Namun, penetapan ini belum dilakukan melalui musyawarah kelurahan (Musrenbang), dan dalam pelaksanaannya, banyak warga yang tidak mengetahui proses penganggaran tersebut. Situasi ini mengindikasikan bahwa metode kelurahan dalam mengalokasikan anggaran belum sepenuhnya terbuka dan belum melibatkan masyarakat secara optimal. Selain itu, mayoritas keputusan mengenai pemanfaatan anggaran masih didikte oleh aparat kelurahan, bukan berdasarkan saran yang datang dari masyarakat. Oleh karena itu, meskipun telah ada usaha untuk menyusun program kerja yang sesuai ketentuan, sasaran untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud.

5.2 Saran

1) Saran Instansi

- Kelurahan warmasen harus lebih meningkatkan tingkat transparansi anggaran dengan mempublikasikan anggaran dalam bentuk papan informasi, digital serta pertemuan warga. Melibatkan aktif masyarakat dalam akuntabilitas publik dalam mengevaluasi kinerja kelurahan kepada sebagai bentuk akuntabilitas.
- Kepada pemerintah Kabupaten raja Ampata agar memberikan kewenangan kepada kelurahan untuk menyusun DPA sendiri agar kelurahan lebih mandiri dan mudah mengalokasikan kebutuhan kelurahan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

2) Saran Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas cakupan penelitian ke kelurahan lain guna mendapatkan data perbandingan yang lebih komprehensif. Peneliti selanjutnya sebaiknya juga menerapkan pendekatan partisipatif atau metode kuantitatif untuk menyelidiki pemikiran serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, P., Zuliyana, S., & Asrina, S. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 474-485.
- Afriani, B. R., & Satyawan, M. D. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016-2018. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(2), 195-204.
- Alam, W. Y., Lasiyono, U., & Miradji, M. A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Bentuk Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Desa Temuireng Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 8(1), 88-102.
- Alfiah, A. (2024). *Pemanfaatan teknologi digital dalam memberikan pelayanan publik di kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Arifin, S., & Tarigan, E. S. B. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Cibubur Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 22-30.
- Uspur Rogis Terovisa, R. (2022). *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).
- Atikah, A., Rusmardiana, A., & Tiara, T. (2022). Penyuluhan Pentingnya Iso 9001: 2015 Dalam Pelayanan Publik Pada Kelurahan Gandul Cinere. *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 5-9.
- Bagus, S. N. A. 2023. akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan (studi kasus di kelurahan karangrejo kecamatan gajahmungkur kota semarang). Semarang: Universitas Semarang.

- Fadillah, M. I., & Sembiring, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1360-1376.
- Fahril, Y. (2024). *Eefektivita Penggunaan Anggaran Di Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makasar).
- Gampu, N. N., Tulusan, F., & Mambo, R. (2024). Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 33-44.
- Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126-140.
- Hisriani, H., Jamil, B., & Simamora, B. (2024). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2), 142-150.
- Hutapea, C. (2022). Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2021 (Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 170-186.
- Iqbal, A. M., & Sastrawati, N. Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Siyatuna*, 2
- Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).

- Kobar, A. B. (2022). *Pelaksanaan Musrenbang Di Kelurahan Mulyorejo (Studi Proses Penyusunan Prioritas Usulan Pembangunan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Mulyorejo)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Merdeka Malang).
- Noviana. (2024). Pengelolaan Dana Alokasi Umum (Dau) Di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar: Perspektif Transparansi Dan Akuntabilitas. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*.
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95-111.
- Putra, A. S., Harmain, H., & Nurwani, N. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat Untuk Meningkatkan Kenyamanan Masyarakat. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 60-74.
- Qak, M., & Holifah, N. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. *Jisp (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 49-59.
- Ramdhani, M. G., & Saputro, E. P. (2025). Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Yamaha Gear 125 di Kota Surakarta. *Center of Economic Students Journal*, 8(1), 44-58.
- Rina Halizah Nasution, & Yenni Samri Juliati Nasution. (2023). Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan (Studi Kasus Bidang Perencanaan Anggaran Kota Medan).

- Saragih, M. A. J., & Sari, E. N. (2024). Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), 117-130.
- Sari, P. Z., Sari, N., & Prastoeti, R. R. (2024). Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 3(1), 66-71.
- Sembiring, S., Diana, D., & Fakriah, F. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(4), 37-47.
- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266-278.
- Situmorang, R. Z. (2024). Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi Di Kantor Lurah Medan Sunggal. *Jurnal Ekonomi Revolutioner*, 7(11).
- Supyan, I. S., & Maulidiya, Y. (2024). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Suatu Partai Politik (Study Kasus Psi Kabupaten Garut). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, 1(7), 87-93.
- Sondakh, S. R. E., Rorong, A. J., & Ruru, J. (2023). Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 73-83.
- Ussholehah, E. S. P., & Anggoro, R. W. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan

Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 35(2), 103-117.

Uma, N. U. M. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Desa:(Studi Fenomologi di Desa Anakalang Kabupaten Sumba Tengah). *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(2), 224-248.

Umiani, W. O., & Sujana, I. W. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan:(Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau). *Entries*, 3(1), 16-35.

Widyantini, D. (2024). Akuntabilitas Pada Pengelolaan Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Harjasari Bogor. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 156-162.

Universitas Kristen Satya Wacana. (2025). *Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran*. Repository Universitas. Diakses dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2881/5/T2_092009106_BA B%20IV.pdf

Zai, A. A. J., & Marpaung, P. (2022). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. *Jurnal Governance Opinion*, 7(2), 1-11.

<https://rajaampatkab.go.id/2023/09/18/sejarah/>

Lampiran 1. Instrumen Wawancara

1. Pertanyaan Staf Instansi

Sasaran Informan	
Informan 1	Kasubag Program Distrik
Informan 2	Sekretaris Diatrik
Informan 3	Kepala Kelurahan Warmasen

Pembuka

- 1) Sebelumnya perkenalkan nama saya Felda Ramadani mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- 2) Sebelumnya nama ibu/bapa siapa dan jabatan dikelurahan/ ini sebagai apa?
- 3) Sudah berapa lama bapa/ibu bekerja di instansi ini?

Pertanyaan

- 1) Langkah Apa yang dilakukan oleh kelurahan/distrik untuk membuktikan tingkat transparansi?
- 2) Apakah kelurahan warmasen menyediakan sebuah Media untuk mempublikasikan seluruh laporan sebagai bentuk transparansi misalnya seperti website, papan informasi atau sosial media lainnya?
- 3) Langkah apa yang dilakukan pihak kelurahan untuk memastikan masyarakat mengetahui atau memahami bahwa alokasi anggaran dilakukan secara transparansi?
- 4) Apakah ada kendala yang dihadapi selama mengimplementasikan transparansi anggaran?
- 5) Apakah dalam penyusunan anggaran dikelurahan warmasen sudah dilakukan atau sudah sesuai dengan tingkat akuntabilitas?

- 6) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang diterapkan di Kelurahan Warmasen?
- 7) Bagaimana pihak kelurahan membuktikan bahwa laporan yang sudah disusun sudah sesuai tingkat akuntabilitas?
- 8) Apakah terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi oleh kelurahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas, baik dalam hal pelaporan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran ?
- 9) Apakah masyarakat dan pihak kelurahan bekerja sama dalam menentukan prioritas alokasi anggaran?
- 10) Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengalokasian anggaran kelurahan?

Penutup

- 1) Apa yang Bapak/Ibu harapkan untuk kemajuan kelurahan kedepannya?
- 2) Baik terimakasih atas waktunya Bapak/Ibu

2. Pertanyaan Perangkat Lurah Dan Warga

Sasaran Informan	
Informan 4	Keta RT 05 warmasen
Informan 5	Warga (IRT)

Pembuka

- 1) Sebelumnya perkenalkan nama saya Felda Ramadani mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- 2) Sebelumnya nama ibu/bapa siapa dan pekerjaan sebagai apa?

Pertanyaan

- 1) Apakah Bapak/Ibu pernah melihat informasi penggunaan anggaran kelurahan, misalnya di papan pengumuman, media sosial, atau pertemuan warga?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi soal anggaran kelurahan mudah diakses oleh masyarakat umum?
- 3) Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi terkait dana yang digunakan oleh kelurahan?

- 4) Apakah Bapak/Ibu merasa anggaran yang digunakan oleh kelurahan dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat?
- 5) Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat laporan atau penjelasan dari distrik dan kelurahan terkait penggunaan anggaran, misalnya dalam pertemuan RT/RW?
- 6) Apakah Bapak/Ibu, pernah berdiskusi atau memberi masukan tentang program yang dibiayai dari anggaran kelurahan?
- 7) Apakah menurut Bapak/Ibu dana kelurahan digunakan untuk kegiatan yang memang dibutuhkan oleh warga?

Penutup

- 1) Apa yang Ibu/Bapa harapkan untuk kemajuan kelurahan?
- 2) Terimakasih Bapa/Ibu

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Biodata Informan

Nama	Wansawiyai
Pekerjaan	Kasubag Program (Distrik)
Lokasi	Kantor Distrik
Tanggal	18 April 2025
Durasi	10 Menit 35 Detik
Kode Informan	K1

Kode	Pertanyaan	Kategori	KK	KT
F	Sebelumnya perkenalkan nama saya Felda Ramadani mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong biasa di panggil Felda			
K1	Universitas apa?			
F	Pendidikan Muhammadiyah sorong Unimuda Sorong			
K1	Unimuda Oooh iyaa silakan			
F	Ee langsung saja sebelumnya nama ibu/bapa siapa dan jabatan dikelurahan ini sebagai apa, di distrik ini sebagai apa?			
K1	Ee nama Rosalina sawiyai dari distrik kota Distrik kota waisai jabatan Kasubag program keuangan			
F	Ee sudah berapa lama ibu/bapa bekerja di intansi ini?			
K1	Dari 2019			

F	Eee masuk kepertanyaanya pertama, Langkah Apa yang dilakukan oleh pihak distrik untuk membuktikan tingkat transparansi anggaran kepada masyarakat? untuk dan distrik?			
K1	Kalau untuk kami distrik ee inikan penyaluranya itu <i>anggarnya itu nanti ee kita eee untuk setiap distrik dan kelurahan kita kita dari distrik yang kelola barunanti dia punya anggaranya tu kita anggarkan ke masing-masing kelurahan</i> dan dari situ nanti <i>masing-masing kelurahan yang kelola untuk mungkin masyarakat setempat ya mungkin dalam bentuk ee kebersihan ke masing-masing RT</i> itu nanti dari masing-masing kelurahan ee lurah yaa dianggarkan untuk masing-masing rt untuk dia punya kebersihan	1. Realisasi anggaran 2. Realisasi anggaran	1,2 W4	KW 3
F	Baik ee lanjut Apakah pihak distrik menyediakan sebuah media informasi untuk mempublikasikan seluruh laporan sebagai bentuk transparansi misalnya seperti website, papan informasi atau sosial media?			
K1	Itu biasanya dari pihak distrik yang ee kita cuman penyaluran ke masing-masing kelurahan nanti mereka yang iya kalau begituade selamat siang saya bantu ibu eeee maaf ade kita sudah pernah ketemu too			
F	Iya bisa bu			
K1	Yang pasti kita di distrik ini biasanya kami tidak bikin begitu karna kami hanya operasional kantor tidak untuk kegiatan kemasyarakat kita <i>hanya operasional kantor saja jadi kita anggarkan ke kelurahan jadi lurah itu bisa macam ATK makan minum itu saja</i> itu saja jadi untuk ke masyarakat itu tidak Uuu kasian jadi tidak untuk ke masyarakat karna untuk kedalam operasional kantor	1. Anggaran operasional kantor 2. Transparansi Anggaran	W5 W1	KW3 KW1

	jadi <i>tong tidak perlu bikin sesatu laporan ke media ke masyarakat</i> to kayanya tidak hanya khusus distrik dan kelurahan saja untuk operasional dalam kantor saja			
F	Baik berarti anggarannya hanya untuk kegiatan prasarana dalam kantor ya bu			
K1	Iya ade macam itu <i>operasional dalam kantor penyediaan ATK kertas tinta pena map itu lain-lain aa trus makan tu kalau ada pertemuan rapat aa itu itu saja macam itu ada kegiatan keluar aa itu PP itu saja yang lain tidak ada untuk kerja bakti untuk masyarakat</i> tidak ada kita tidak ke untuk untuk dana dari distrik ke kelurahan itu tidak untuk masyarakat itu untuk apa ee operasional dalam kantor saja jadi <i>kita tidak perlu publikasi atau keluar untuk masyarakat tau to begitu</i> , hanya untuk kebersihan lingkungan per lurah jadi mungkin itu yang tong rasakan untuk kebersihan kelurahan lewat RT masing-masing begitu saja	1. Anggaran Operasional 2. Transparansi Anggaran	W5 W1	KW3 KW1
F	Lanjut bu?			
K1	iyaaaa			
F	Eee mungkin Apakah ada kendala yang dihadapi selama mengimplementasikan transparansi anggaran tersebut? Mungkin ada kendala bu yang di hadapi			
K1	Kalau kendala yang kita hadapi tidak ada			
F	Karnakan mungkin anggarannya tidak di publikasikan yah bu			
K1	Kalau dia punya kendala tidak ada karna kan <i>anggaran yang kita keluarkan hanya untuk operasional</i> yaitu kita langsung kasi ke kelurahan nati kelurahan yang masing-masing jadi kalau kita punya kendala anggaran tidak ada yang kita hadapi selama ini yaa kita jalani saja apa adanya	Anggaran operasional	W5	KW3

F	Baik bu lanjut, apakah dalam penyusunan anggaran kelurahan sudah dilakukan atau sudah sesuai dengan tingkat akuntabilitas?			
K1	Itu maksudnya bagaimana?			
F	Dalam penyusunan anggaran apakah sudah memenuhi standard akuntabilitas anggaran?			
K1	Kalau untuk penyusunan anggaran ya dari tahun ke tahun bagaimana maksudnya bagaimana?			
F	Maksudnya dalam proses penyusunan anggarannya itu sudah sesuai dengan standard akuntabilitas atau sudah sesuai proses proses akuntabilitas			
K1	Iya sudah sudah sesuai			
F	Mungkin dalam proses perencanaannya, penyusunannya pelaporannya			
K1	<i>Iya semuanya sesuai dengan penyusunan anggaran itu sudah sesuai</i>	Sesuai: standar akuntabilitas penyusunan anggaran	W2	KW2
F	Iya berarti sesuai			
K1	Iya			
F	Iya lanjut bagaimana mekanisme pertanggungjawaban anggaran kelurahan yang diterapkan di kantor distrik?			
K1	<i>Kalau untuk mekanismenya ya sudah berjalan dengan baik</i>	Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran	W6	KW3
F	Iya lanjut Bagaimana pihak distrik membuktikan bahwa laporan yang sudah di susun sudah sesuai prinsip akuntabilitas?			
K1	Itu maksudnya bagaimana secara teratur			
F	Mungkin kaya dalam proses penyusunannya itu ee pihak penyusun sudah bisa membuktikan bahwa laporan yang disusun ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang di terapkan dalam penyusunan laporan keuangan			

K1	Yaa kalau itu sesuai to berjalan <i>sesuai dari tahun ke tahun itu sudah sesuai sesuai dengan anggaran</i>	Penyusunan anggaran yang akuntabel	W2	KW2
F	Sesuai dengan aturan yang di tetapkan yah bu?			
K1	iyaa			
F	Apakah terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi oleh pihak distrik dalam mengimplementasikan akuntabilitas, baik dalam hal pelaporan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran? Apakah ada kendalanya bu dari proses-proses tersebut			
K1	Kalau selama ini tidak ada semua berjalan dengan baik			
F	Pertanyaannya lanjut, apakah distrik, kelurahan dan masyarakat bekerja sama dalam menentukan prioritas alokasi anggaran?			
K1	<i>Iya baik semua berjalan dengan baik</i> semuanya bagus tidak ada kendala	Partisipasi penentuan alokasi anggaran	W3	KW3
	Koneksiii terputussss			

Biodata Informan

Nama	Anwak Kapitan Lau
Pekerjaan	Sekretaris (Distrik)
Lokasi	Kantor Distrik
Tanggal	30 April 2025
Durasi	36 Menit 30 Detik
Kode Informan	K2

Kode	Pertanyaan	Kategori	KK	KT
F	Sebelumnya perkenalkan nama saya Felda Ramadani mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Sebelumnya nama ee bapa siapa dan jabatan di Distrik ini sebagai apa?			
K2	Iya saya Markapitan Lau eee nama saya markapitan laut jabatan			

	saya sekretaris distrik kota waisai saya sudah menjabat ee kurang lebih hampir tiga tahun di sini			
F	Lanjut Langkah Apa yang dilakukan oleh pihak distrik untuk membuktikan tingkat transparansi anggaran?			
K2	Dalam berbicara <i>anggaran pada distrik kota waisai dia sangat transparan terkait badan pemberitahuan terkait DPA disampaikan kepada seluruh staf BKD ee apa staf-staf yang ada di distrik bahkan di kelurahan dengan cara aa dengan cara apa DPA yang di terima diserahkan ke penanggung jawab tentu ibu lurah mereka sendiri</i> naa itu transparansi, setiap pencairan tidak ada tidak ada mau keluar uang lima ribu di sampaikan lima ribu dan satu lagi kepala distrik kota tidak pegang uang dia hanya memerintahkan mengeluarkan dan yang pegang ibu bendahara sebagai penanggungjawab uang-uang itu kalau kita pencairan uangnya langsung diserahkan dikelurahan.	Transparansi Anggaran	W1	KW1
F	Apakah pihak distrik menyediakan sebuah alat untuk mempublikasikan seluruh laporan sebagai bentuk transparansi misalnya seperti website, papan informasi atau sosial media lainnya?			
K2	Iya kalau untuk apa keterkaitan anggaran dana desa kan beda dengan kita khusus kita dalam <i>DPA kita tapi dalam DPA kita langsung sampaikan kita punya staf, contohnya saya sekretaris saya</i> ditunjuk oleh DPA langsung da nee untuk di publikasikan mohon maaf kita punya anggaran ini eee dalam pemda pun sudah di sampaikan bahwa khusus untuk	1. Pelaksanaan DPA 2. Transparansi Anggaran	W9 W1	KW5 KW1

	<i>distrik kita kita tidak memiliki ee anggaran untuk kegiatan-kegiatan besar tetapi kita hanya di khususkan untuk penatausahaan</i>			
F	Langkah apa yang dilakukan distrik untuk memastikan informasi anggaran dari kelurahan dapat diakses oleh masyarakat?			
K2	Kalau akses anggaran langsung kepada masyarakat itu ada beberapa ee mohon maaf <i>anggaran yang ada di kelurahan hanya untuk operasional kerja bukan untuk kegiatan kegiatan fisik jadi hanya menumpang kita punya aktivitas perkantoran sehari-hari</i> bukan untuk contohnya kaya kota besar seperti Jakarta, bandung dan lain-lain karna mereka punya PAD besar sehingga mereka punya kelurahan itu enggan dengan kegiatan-kegiatan mandiri contoh pembangunan-pembangun, perbaikan irigasi dan juga kegiatan sosial yang lain-lainya contoh ee pemberian bantuan kepada panti asuhan dan lain-lain kalau kita khususnya di distrik kota waisai kita hanya di khisikan untuk ee yang tadi saya sampaikan <i>kita dikhususkan kita punya belanja harian saja kita tidak ada kegiatan besar contohnya pembangunan, pemakaian lahan untuk perbaikan ini rehab ee kantor tidak ada jadi kita punya ini hanya penatausahaan</i> jadi kita tidak ada anggaran yang besar-besar seperti apa perkiraan contohnya wamena apa kecil sekali.	1. Anggaran Operasioan 2. Anggaran Operasioan	W6 W6	KW4 KW4
F	Apakah ada kendala yang dihadapi selama mengimplementasikan			

	transparansi anggaran?			
K2	<p>Banyak contoh kendala yang kami hadapi itu satu anggaran ini tidak dikhususkan <i>untuk pemeberian bantuan hanya di khususkan untuk makan minum masyarakat atau pegawai dalam kantor</i> ya tetapi dalam berjalanya waktu ada <i>sumbangan masuk berupa proposal bantuan sehingga porsinya kan berkurang aa sehingga kasian kepala distrik mengambil satu kebijakan mengurangi porsi anggaran</i> contohnya mengambil kita punya makan minum dikurangi hanya untuk memberikan bantuan aa kenapa saya bilang sangat-sangat karna pemberian bantuan ini bukan hanya informal saja contoh ada masyarakat dari tempat lain yang susah dia datang kenapa dia tidak datang ke orang lain karna pas butuh dia ada di sini dia tidak mungkin dia datang ke kantor bupati sana dia cari kepala distrik dia minta bantu kenapa rasa kekeluargaan di kabupaten raja ampat sangat terlalu kuat kuat sehingga kendala yang kami hadapi bukan hanya kendala yang ada di dalam kantor ya contoh kecil operasional dialokasikan untuk ee contoh kalau beberapa tahun lalu tidak ada untuk pembayaran listrik karna kantor ini kami gunakan bersama-sama dengan sekretaris dewan pada saat sekretaris dewan mereka pindah ke kantor baru mereka kami di sini terbengkalai dengan pembayaran listrik anggaranya dari mana kita pangkas anggaran kita yang lain jadi bayak dilemma yang ada di luar kantor. Trus contoh dalam berjalanya waktu kita tidak mungkin sehat saja pasti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Operasional 2. Pemotongan anggaran kelurahan 3. Pemotongan anggaran kelurahan 4. Pemotongan anggaran kelurahan 	<p>W6</p> <p>W7</p> <p>W7</p> <p>W7</p>	<p>KW4</p> <p>KW5</p> <p>KW5</p> <p>KW5</p>

	<p>ada yang sakit yang <i>sakit ini bukan hanya kita punya anggota kantor masyarakat yang di luar juga kalau sakit mungkin karna kenal karna kerabatnya ada di distrik dia datang ke sini minta bantu mau tidak mau pa distrik yang kerjakan</i>. Contoh yang sangat-sangat sosial itu orang meninggal siap tau manusia di dunia ini contoh kecil tahun kemarin awal tahun tu tiba-tiba <i>berita duka masuk mau pencairan di mana ini masa libur pa distrik yang bicarakan bendahara ambil dulu</i> kita bicarakan dari awal-awal tahun sampai dengan sekarang DPA belum diberikan pincang kita semua ini mereka di sana bertatap muka dengan masyarakat jarang kalau kita di sini setiap hari jadi masyarakat punya segala sesuatu pasti kita tau yaa jadi sebenarnya terjadi, yaa kalau kita cerita tidak akan habis tapi kita berbicara secara sosial yang sering di jumpai</p>			
F	<p>Kita di sini masuk dalam poin akuntabilitas Apakah dalam penyusunan anggaran dikelurahan warmasen sudah dilakukan atau sudah sesuai dengan tingkat akuntabilitas?</p>			
K2	<p>Kelurahan warmasen saya ralat distrik kota, <i>distrik kota kita yang mengeluarkan anggaran 4 kelurahan</i> dan dalam proses pelaporan <i>uang yang kita berikan kita minta pertanggungjawabannya sesuai dengan jumlah besaran uang yang di berikan berupa nota-nota pertanggungjawaban</i> belanja hasil belanja mereka hasil belanja mereka serakan ke kasubang program dan keuangan nah beliau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran 2. Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 3. Penyusunan anggaran sesuai Standar akuntabilitas 	<p>W5 W3 W2</p>	<p>KW4 KW3 KW2</p>

	lah yang bertugas untuk menyusun segala bentuk laporan nah saya selaku sekretaris yang mengawasi apabila ada kendala yang dihadapi kita koordinasi nah trus mencari solusi sebelum kita laporkan kepada kepala distrik itu untuk akuntabilitasnya jadi <i>kasubag program dia bertugas untuk menyusun program itu ya pertanggungjawaban ke LL mulai dari laporan pertanggungjawaban</i> mulai dari per triwulan per enam bulan per tiga bulan berikut sampai satu tahun yaah			
F	Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang diterapkan di Kelurahan Warmasen?			
K2	Dan keluarahan warmasen seperti yang tadi saya sampaikan <i>kita mengeluarkan uang dari bendahara, bendara mengeluarkan uang ke kekelurahan</i> melalui ee kita distrik mengeluarkan uang ke kelurahan melalui bendahara dengan distrik langsung ke lurah-lurah aa dalam penyerahan anggaran itu ber <i>lurah-lurah punya tanggungjawab melaporkan penggunaan keuangan tersebut</i> sesuai dengan apa ee yang di butuhkan contoh tapi sesuai dengan contoh kecil <i>pembayaran listrik ee makan minum di kantor penyediaan ATK kalau bisa memulir di back up degan kebersihan kantor dan yang lain-lain</i> karna itu rumah tangga sendiri setelah itu proses pelaporanya setelah mereka menggunakan uangnya hasil dari ee atau <i>bukti-bukti belanja hasil belanja mereka dilaporkan kembali ke kantor distrik dengan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Anggaran 2. Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 3. Anggaran Operasional Kantor 4. Anggaran Operasional Kantor 5. Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 6. Penyusunan Anggaran Sesuai Standar Akuntabilitas 	<p>W2</p> <p>W3</p> <p>W6</p> <p>W6</p> <p>W3</p> <p>W2</p>	<p>KW4</p> <p>KW3</p> <p>KW4</p> <p>KW4</p> <p>KW3</p> <p>KW2</p>

	<p><i>menyerahkan bukti-bukti ee belanja mereka berupa dokumentasi dan nota dari situ kasubang program akan merkap laporan tersebut aa dijumlahkan dan dilaporkan kembali ke bagian keuangan ke kantor ya bagian keuangan biasa kita serahkan ke bagian akuntansi berupa SPJ aa setelah SPJ itu dilaporkan maka kalau ada pencairan berikut kita akan menunggu waktu disampaikan dari keuangan</i></p>			
F	<p>Bagaimana pihak distrik membuktikan bahwa laporan yang sudah di susun sudah sesuai tingkat akuntabilitas?</p>			
K2	<p>Laporan yang kita indikatornya yaitu <i>uang yang di keluarkan dipertanggungjawabkan dengan ee bukti-bukti itulah yang menguatkan</i> aa tapi contoh kecil yang saya kita hadapi di lapangan yang sering dan kenyataan kalau di Jakarta dan di Jawa sana mungkin kita pesan langsung tiba di tempat dengan total harga yang sama kalau kita di sini tidak kita pergi pesan kalau dari toko di antar kadang dia bilang pa saya cuman sampai di misalnya kita pesan di sorong misalnya yang dulu-dulue dulu-dulu kita pesan di sorong contoh mesin babat kedua kita pesan kursi karna kita pesan dalam jumlah banyak tidak mungkin kita pesan di sini kenapa harganya disini beda terbalik dengan di sorong kenapa disini kita beli 1 kursi disana kita bisa beli beli kursi plus 1 barang yang lain nah dikarnakan persaingan harga dan juga perbedaan harga yang ada sehingga kalau kita pesan disorong maka yang kendala yang kita hadapi pertama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 2. Penyusunan Anggaran Sesuai Standar Akuntabilitas 	<p>W3</p> <p>W2</p>	<p>KW3</p> <p>KW2</p>

	<p>sampai di pelabuhan rakyat ada tenaga butruh oke dari toko aman-aman have fun sampai di pelabuhan tenaga buruh sampai di kapal kita sewa turun lagi kita bayar lagi sampai disini tidak angkuta kita pake lagi angkutan berarti total harga yang kita perhitungkan akan sama ada selisi harga selisi harga yang kita tentukan karna yang kita belanjanya banyak nah untuk transparansi akuntabilitas ee terkait akuntabilitas anggaran kita sudah memperhitungkan itu semua sesuai dengan keadaan lapangan nah daripada kita membeli dalam jumlah banyak dengan pengeluaran yang kita kalau kita hitung tiga kali kita mines ini lebih baik kita beli sorong supaya kita bisa hitungkan 2 kali kita bayar masih untung sekali aa uang sekali itu kita bisa alokasikan untuk kegiatan yang lain contoh kesejahteraan pegawai itu dia karna pegawai tidak sejahtera pasti pekerjaanya mandet dengaree</p>			
F	<p>Apakah terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi oleh pihak distrik dalam mengimplementasikan akuntabilitas, baik dalam hal pelaporan, pertanggungjawaban penggunaan anggaran</p>			
K2	<p>Kalau kendala yang kita hadapi biasanya tidak terlalu berat yang beratnya itu cuman satu kadang kalau macam kita apa minta untuk segera masukan laporan ada keterlambatan satu atau dua hari hanya keterlambatan dari kelurahan untuk memberikan laporan ke distrik kenapa kita di distrik ini biasanya kita sudah tau total uang yang keluar misalnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Anggaran 2. Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 3. Partisipasi Alokasi Anggaran 	<p>W8 W3 W4</p>	<p>KW5 KW3 KW4</p>

	<p>50 juta Nah 50 juta distrik sapordanco dialokasikan uang 5 juta itu sudah dari DPAnyanya totalnya kan ee 50 Ribu 50 juta 5 juta juta di sapordanco 5 juta di waisai kota 5 juta berarti 20 juta sudah keluar 30 juta ini kita punya operasional listrik lima-lima juta itu juta itu operasional Kelurahan Nah kita tinggal bikin laporan punya kita 30 kita tunggu 5 5 juta dari kelurahan masuk baru kita masuk ke laporannya begitu kalau kendalanya tidak karena kita sebagai pusatnya kita yang mengeluarkan anggaran kita yang bertanggungjawab itu sehingga mohon maaf kita mau tidak mau kita juga tunggu mau tunggu dari mau tunggu apa Mau tunggu keterlambatannya kita tidak bisa tidak bisa masukkan karena kalau Satu kelurahan belum masukan laporannya tida bisa karena kita coba kita moakalin tidak mungkin mereka yang belanja Iya kan mereka harus pertanggungjawabkan dan <i>kepala distrik kota waisai dia menegaskan setiap uang yang diserahkan pemerintah dipergunakan seperti petunjuk teknis kerjanya dan juga di pertanggungjawabkan</i> sesuai dengan yang kalian gunakan uang masyarakat pemerintah dipergunakan sesuai kelurahan dan <i>masyarakat bekerjasama dalam lingkungan untuk menentukan besarnya kalau udah kan tidak sesuai dengan pembangunan infrastruktur wilayah wingkat kesulitan dan lain-lain</i> Jadi kalau Biasanya kita usulkan tetapi biasanya dilihat dari kabupaten disetujui atau tidak contoh kita usul 5000 kaget yang</p>			
--	--	--	--	--

	terjawab cuma 2000 ya kan biasanya begitu kenapa karena kita hanya bisa mengusulkan yang menentukan bukan kita tetapi yang menentukan pemerintah daerah kalau masyarakat kalau kembali ke kota-kota besar contohnya Jakarta Surabaya masyarakat memiliki antik Mereka			
F	Apakah distrik, kelurahan dan masyarakat bekerja sama dalam menentukan prioritas alokasi anggaran?			
K2	Kalau untuk kita di distrik kota waisai <i>untuk menentukan besaran alokasi anggaran kalau sesuai aturan masyarakat menentukan besaran anggarannya distrik itu sesuai kalau DAU ya kalau DA kan tidak sesuai</i> dengan apa pembangunan infrastruktur kalau DAU dia luas wilayah rentan apa rentan kendalanya suatu distri itu tingkat kesulitan dan lain-lain ya kan itu DAUnya bicara ekonomi to jadi kalau di distrik kota untuk sementara dalam penyusunannya kita biasanya kita yang menyusun biasanya kita usulkan tetapi biasanya di lihat dari kabupaten disetujui atau tidak aa contoh kita usul 5 ribu kaget yang terjawab Cuma 5 ribu ya kan biasanya begitu kenapa karena kita hanya bisa mengusulkan yang menentukan bukan kita tetapi yang menentukan pemerintah daerah aa jadi kita tidak punya hak aa kalau masyarakat kalau kembali ke kota-kota besar contohnya Jakarta, jogjakart, Surabaya masyarakat memiliki andil dalam anggaran karnakan masyarakatlah sumber anggarannya dari PAD kalau <i>kita</i>	1. Partisipasi Alokasi Anggaran 2. Penyunan DPA	W4 W9	KW4 KW5

	<p><i>di sini PAD itu daerah punya kalau mereka di sana pendapatan distrik karna distrik sendiri belum memiliki pendapatan</i> apa itu dia memiliki sumbangan ee apa sumbangsi dari masyarakat yang ada disekitarnya yaitu apa pajak distriknya sendiri dari pajak distrik disumbangkan ke PAD daerah aa dia sumbangkan ke PAD daerah ada persentase yang diberikan kembali ke distrik untuk sebagai sumber pendapatan distrik kalau kita di sini waallahu Alam</p> <p>Pengangkatan kebijakan saya</p>			
F	<p>Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengalokasian anggaran kelurahan?</p>			
K2	<p>Kalau berbicara terkait anggaran jujur saat ini jujur ini dalam <i>pengalokasian anggaran kalau kita tidak ambil kebijakan maka tidak akan pernah sesuai anggaran itu tidak akan pernah cukup</i> yang berikut dalam pengambilan kebijakan kita harus mengorbankan yang lain ya kenapa kita mengorbankan yang lain keterbatasan anggaran yang ada membuat apa mau tidak mau kita korbakan kita punya perasaan sendiri itu yang saya bilang dalam ilmu pemerintah seorang pimpinan dia harus berani dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang di ambil walaupun itu memberatkan kenapa dalam mengambil kebijakan itu aka nada yang dirugikan aka nada yang diuntungkan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan itu yang dirugikan itu mau tidak mau dia harus merugikan dirinya sendiri dia yang lain</p>	<p>Pemotongan Anggaran Kelurahan</p>	<p>W9</p>	<p>KW9</p>
F	<p>Apa yang Bapa/Ibu harapkan untuk kemajuan Distrik dan</p>			

	kelurahan kedepanya?			
K2	<p>Kalau saya yang saya harapkan <i>dalam berbicara pakai transparansi sampai dengan akuntabilitas anggaran kalau bisa distrik itu sendiri yang menyusun DPA</i> atau anggaran itu karna dia yang lebih tau kebutuhannya yaa jangan tim penyusun anggaran yang menyusun maka <i>berikanlah kewenangan kepada distrik tersebut atau kelurahan tersebut yang menyusun anggaran karna dialah yang langsung di lapangan bukan bapa-bapa yang duduk di kantor besar.</i> Kenapa saya bicara agak agak spesifik agak-agak pedis karna berbisara terkait keuangan saya pernah makan tidur Saya pernah menjabat jadi camat di luar sana jadi saya lebih tau apa itu susah senangnya seorang camat terkait anggaran saya dua tahun tinggal di dalam keuangan saya belajar keuangan alur kerjanya uang itu gimana dari alur masuk sampai alur keluar pertanggungjawaban saya sudah tahu sehingga kalau mau jawab ini saya lancer aja kalau orang lain kan berpikir jauh tentang keuangan dia hati-hati kalau saya mengalir ya kenapa kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan uang yang bekerja sehingga apa kami korbankan kami punya perasaan untuk mempertanggungjawabkan dengan cara apa korbannya kami sendiri untuk masyarakat yang sejahtera masyarakat banyak di kota sini kalau di kampung sana ada apa-apa ada anak sekolahpun mereka datang minta bantu di kecamatan ini fakta ini terjadi contoh kecil saya waktu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan DPA 2. Penyusunan DPA 	<p>W9</p> <p>W9</p>	<p>KW5</p> <p>KW5</p>

	<p>pendidikan di disebelah rumah tu ada satu perempuan bapanya sudah meninggal dia hidup dengan mamanya saja anak itu masih SMP dia perempuan loh karna kita sering dia kenal dia biasa datang kalau mereka tt saya bilang mau makan kita makan apa sambil makanapa tempat saya tinggal untuk satu tahun pakaian Saya mungkin kalau kita tidak ini kita tidak mungkin saya kenal baik dengan dia karna saking dekatnya saya dengan dia mamanya bilang saya kalau mau saya nikang dengan saya bilang begini mama say anggap mama sudah kaya sapunya orang tua adik ini sasa punya adik dia waktu sayas ekolah pendidikan di STPD uang saya sedikit dari itu sa bantu membayar dia punya uang sekolah kenapa saya ambil itu karna sa tolong orang sa cari orang sampai ke daerah ini sampai detik yang ada ini dia masih sering hubungi saya sekarang Suaminya polisi Mamanya masih ada tapi sudah sakit-sakitan mama sering bicara dengan saya Apa kebijakan kita seorang masih di bawah umur harus berpikir dewasa menyebabkan kita sekarang jadi bukan saya hanya karena saya di distrik tidak kalau saya di sekolah lain itu saya akan buat sama kenapa karena negara bikin sa wajib melihat orang lain satu pesan saya buat semua kita jangan tanya apa yang negara yang membuat buat kita tetapi baliklah bahasa itu apa yang kau buat untuk negri untuk tanah Negara ini itu bahasa itu benar-benar sakit apa yang kau berikan untuk Negara ini itu untuk seorang aparatuur aah saya sudah</p>			
--	---	--	--	--

	<p>kerja yah negra bayar kau untuk kerja tapi apa yang kau buat untuk Negara saya melayani dan itu yang makin dia itu yang menyebabkan seorang aparatur sipil khususnya kami kepala kantor rata-rata kepala distrik harus ambil kebijakan walaupun sakit di kami tetapi kami harus tetap buat kami punya masyarakat senyum ya kenapa masyarakat sini berarti mereka tidak menyalahkan pemerintahan oh berarti pemerintahan bagus Oh ini semua mereka tidak tahu kita punya pembayaran gaji terlambat atau TPP terlambat maka kita ya yang dapat korban itu semua jadi untuk berbicara anggaran Jangan melihat cermin ini dia lihat bening tembus angga cari tahu dulu Material apa yang menyusun ini terus di sebelah cermin ini apakah betul bingung seperti ini Padahal racun udaranya disebelah iya kan tidak ada yang tau itu pribahasa yang sa kasih untuk ee keterkaitan tentang keuangan uang itu benar nyata tetap uang dengan uang itu bisa menikah benare oh iya tambahan kita di distrik kota ini lebih sibuk daripada di kantor besar sana Mereka di kantor besar sana hanya menyusun uang kegiatan tidak ada interaksi dengan masyarakat kami di sini sudah makan susahny masyarakat sudah makan keluhannya masyarakat sumpah sarapannya masyarakat kami yang telan semua kalau menyusun karya tulis kalau pemerintahan itu jangan lihat di kantor besar lihat di kantor yang kecil-kecil contoh kelurahan atau distrik karna apa mereka yang ketemu masyarakat mereka</p>			
--	---	--	--	--

	<p>yang bicara untuk masyarakat mereka di sana hanya bicara proyek saja kenapa saya bicara kasar begitu ini fakta kalau di kecamatan kasihan dengan uang yang cuman 10 ribu rupiah dia harus bagi bagaimana menghidupi ini bantuan di sana ini di sini padahal dalam alokasinya tidak ada untuk bantuan-bantuan yang ada hanya penatausahaan di dalam kantor itu seorang pemimpin yang hebat itu bukan di dalam kantor ngga di lapangan yaa manusia ini kalau hanya duduk di dalam tempurung itu omong kosong kenapa saya bicara begini seorang pelaut yang tanggung bukan dia duduk memancing gitu-gitu pinggir pulo tidak dia ketengah laut san kopeng badai yang besar sampai nyawa jadi tarhan malah tetapi sebelum dia mati dia harus selamatkan nyawa-nyawa yang dia bawah sebelum saya mati pasti tenggelam dengan saya punya kapal karna itu saya punya rumah tapi saya harus selamatkan nyawa-nyawa yang ada di atas kapal itulah seorang pemimpin kalau kami di dalam kesaksian kenapa selalu ambil contoh kami saya di didik dan di tempatkan dibentuk sampai dengan sekarang saya punya professor dia sampaikan buat saya begini apa arti kriminologi menurut kamu itu profesor saya yang bikin buku itu kriminologi ilmu pemerintahan siapa yang cipta itu professor talisindrah saya punya professor saya sekretaris ee apa namanya saya asisten dosen waktu dia mengajar karna di dalam .. saya punya jabatan banyak kampus jatinarsubangsa saya di tempatkan di sana 4 tahun</p>			
--	--	--	--	--

	<p>saya dibentuk mental kedisiplinan kepribadian dan juga kami dibentuk untuk Bagaimana memperlakukan masyarakat dengan baik kenapa saya harus bayar kepada masyarakat bukan hanya pengabdian karena masyarakat kasi sekolah saya itu yang kadang tidak disadari bagi yang lain nonton masyarakat masyarakat saya cuman tau sekolah gratis bahkan saya Kalau saya punya pengaruh saya ke sini orang katanya Samsung ghairudin dia bilang apa ini kita buat kalau pakai apa yang kau buat kalau saya dalam agama menjadi seseorang yang memiliki sejarah sesuatu yang ada menjadi orang kaya dia bantu satu orang dia bilang saya bantu kau Dia bilang saya kan Pak apakah dia bilang tidak perlu kau bukan saya tetapi kau melakukan hal yang saya minta apa dan perempuan ini batu tiga orang yang Dan disampaikan pesan saya mereka tidak tahu Supaya apa kalau itu berjalan terus saya bicara tentang uang kalau bagi saya sekarang saya kerja pesan Bupati Raja Ampat kuotanya tekan Bupati Raja Ampat kode-kode anak muda buat saya kerjalah maka uangnya enggak kerja kau tahu tidak kerja dan kau hanya duduk-duduk saja seperti orang yang lain bahkan saya terlepas dari beliau waktu kepala badan keuangan saya yang Adiknya juga buat kamu siapa yang pertama saya dapat ikan banyak jalan-jalan saya bicara ini Nilai ini yang saya dapat saya tambah tidak mengurangi setiap pengorgan yang mereka pancingan saya bilang Bapak kalau mau kita sayang silakan</p>			
--	---	--	--	--

	takut saja yang saya mau bilang saya tidak pernah menggunakan uang pakai senang-senang waktu itu ya saya Camat kurang lebih 7 tahun Apakah Camat jalannya enggak mau kebutuh satu WC Saya punya dua unitt motor itu Keluar atuh mereka yang ketemu masyarakat Rp10.000			
F	Baik terimakasih bapa			

Biodata Informan

Narasumber	Hamida Mambraku
Jabatan	Ketua Kelurahan Warmasen
Lokasi	Kantor Kelurahan Warmasen
Tanggal	10 Maret 2025
Durasi	13 Menit 6 Detik
Kode Informan	K3

Code	Pertanyaan	Kategori	KK	KT
F	Sebelumnya Perkenalkan nama saya Felda Ramadani mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong			
F	Ee sebelumnya Langsung saja perkenalkan nama ibu siapa dan jabatan ibu di kelurahan ini sebagai apa?			
K3	Nama saya Hamida Mambaraku S.E ya jabatan kepala keluarahan golongan dan pangkat 3B, memang sekarang 3D tapi belum ada jadi 3B sekarang yang dipake 3D.			
F	Baik uhum sudah berapa lama ibu bekerja di instansi ini?			
K3	Kalau saya pertama ee PLS itu sa dulu di ee apa nama ss ke e dinas pendapatan daerah saya			

	kemarin dilantik 2017 itu kepala kelurahan di sapodanco aa sekarang kita roling saya roling saya dapat di warmasen iya dari 2017 saya roling 2017 18 19 19 saya dapat di warmasen sampai sekarang			
F	Baik langsung saja di pertanyaanya intinya ya bu saya ke pertanyaanya, langkah apa yang dilakukan kelurahan untuk membuktikan tingkat transparansi anggaran kelurahan			
K3	Itu yang sa pernah kemarin saya bahas dengan ade sekilas yah			
F	Iya Bu			
K3	Kalau untuk masalah anggaran <i>selama inikan kita lurah bukan kita yang kelola yang kelola itu adalah distrik karena kita satu pintu jadi</i> DPAnya DPA kita DPA empat kelurahan dengan distrik 1 DPA jadi kita tidak tau anggaran itu dia berjumlah berapa yang kita tautu <i>setiap pencairan yang kita dapat itu sekian karna kita punya DP</i> Akan tidak <i>di foto copy</i> maksudnya kita juga maksudnya sebagai kepala kelurahan yah kita tidak tida tida apa namanya istilahnya iterfensilah yah memang itu kita punya hak yah kita punya hak dalam tapi kita tidak interfensi karna kita satu pintu dengan distrik jadi itu yang di cairkan	1. Penyusunan DPA 2. Transparansi Anggaran Kelurahan	W9 W1	KW5 KW1

	yah itu yang kita dapat seperti itu			
F	Baik apakah keluarahan warmasen menyediakan sebeuah alat untuk mempublikasikan seluruh laporan sebagai bentuk transparansi anggaran sebagai bentuk transparansi misalnya website, papan informasi atau sosiial media?			
K3	<i>Kalau itu selama ini belum ada</i>	Transparansi Anggaran Kelurahan	W1	KW1
F	Langkah apa yang dilakukan pihak kelurahan untuk memastikan masyarakat mengetahui atau memahami bahwa alokasi anggaran dilakukan secara transparan			
K3	<i>Masyarakat selama ini tidak pernah tau</i>	Transparansi Anggaran Kelurahan	W1	KW1
F	Apakah ada kendala yang di hadapi selama mengimplementasikan transparansi anggaran			
K3	Apa?			
F	Apakah ada kendala yang di hadapi selama mengimplementasikan transparansi anggaran			
K3	Yah kalau memang kendala sih kita kendala kendalanya tu karna begini kekurangan kita ini terlau banyak kekurangan banyak sekali tapi yah apa yang kita buat kita tidak pernah bisa buat apa-apa <i>malah kita punya gaji sendiri kita korbakan</i> jadi seperti itu ade	Pemotongan Anggaran Kelurahan	W7	KW5
F	Baik masuk pada poin akuntabilitas			
K3	Iya			

F	Eee apakah dalam penyusunan anggaran di kelurahan warmasen sudah dilakukan atau sudah sesuai dengan tingkat akuntabilitas ?			
K3	Ss aduh kalau apa yang ade tadi ade sampaikan itu yah bagemanae saya mau sampaikan ke ade do bagemanae			
F	Karna mungkin anggaranya			
K3	Anggaranya iya jadi kita selama ini jujur saja selama ini kita yah itulah istilahnya kita diam kita bertanya juga selalu sering memang kita berdebat dengan kepala distrik sese apa maksudnya terkait masalah anggaran tapi sama kita berdebat juga tidak ada dia punya titik terangnya itu tidak ada samasekali untuk kita makanya kita lebih pilih diam saja apa yang dikasih bendahara kelola yah itu yang kita terima seperti itu malah kita ini punya utang banyak utang itu apa seperti ATK itu kita utang, anggaran yang kita dapat seandainya 50 juta itu sudah di potong sudah di potong oleh kepala distrik atau bendahara berapa persen <i>kita dapat Cuma berapa persen bahkan kita mau beli ATK saja tidak bisa terpaksa kita utang nanti cair kedua aa itu baru kita tutup-tutup ini memang kita terbuka saja</i>	Pemotongan Anggaran Kelurahan	W7	KW5

	kita tidak bisa tutupi tutupi seperti itu ade			
F	Lanjut bagaimana mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang diterapkan di kelurahan warmasen			
K3	Ehem ya itu misalnya dari saya yah lurah saya mau itu yang terbaik lah maksudnya untuk eee anak <i>didalam kantor masyarakat tapi yah itu anggaran itu dia mines</i> jadi kita tidak bisa maksudnya ini yang harus kita harus kita apa ee kita harus utamakan coba ade sendiri lihat ade sendiri lihat dari luar sampai ke dalam Cuma begini saja Kita tidak bisa bikin apa-apa apa yang kita mau tambahkan kita tidak bisa tambahkan karena sesuai dengan anggaran tadi kalau memang Memang kita punya kebutuhan sesuai dengan apa yang kita sampaikan dia melebihi daripada itu bisa tapi coba lihat saja tidak ada baru memang memang itu cocok dari tahun ke tahun itu kita dari Kelurahan terus <i>dari distrik kita sudah apa istilahnya kita tidak ajukan kita suka ajukan permohonan untuk maksudnya menambahkan kita punya anggaran tapi sama saja</i> tetap cuma itu saja ya kita punya anggaran itu minimal itu itu cuma 200 juta jadi itu	Pemotongan Anggaran Kelurahan	W7	KW5

	cuma paling tinggi itu 4 kali pencairan itu dalam satu tahun dalam satu tahun			
F	Baik lanjut saja Apakah terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi pihak kelurahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas dalam hal pelaporan, pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran?			
K3	Itu yang saya sudah sampaikan to di ade kalau itu yang memang kita kita lurah yang memang kita rasa bagaimana ya kita sudah usulkan tapi ternyata apa yang kita usulkan sama saja jadi memang beban juga beban juga untuk kita sebagai kepala ke kepala keluarga kita memang beban sekali ya tapi kita mau bikin bagaimana kita tidak bisa bikin apa-apa kita tidak bisa menjawab bahwa Maksudnya kita menjamin bahwa eee nanti segala sesuatu itu dia harus harus tercapai lah gitu toh tapi ya <i>kenyataannya tidak ada sama sekali karena kekurangannya seperti itu</i>	Pemotongan Anggaran Kelurahan	W7	KW5
F	Masih pada poin alokasi anggaran eee apakah masyarakat dan pihak kelurahan bekerja sama dalam menentukan prioritas alokasi anggaran?			
K3	<i>kalau memang kerjasama untuk itu iya</i>	1. Realisasi Anggaran 2. Transparansi	W5	KW4

	tapi <i>kalau untuk waktu itu anggarannya itu tidak jujur ya</i>	Anggaran keluarahan	W1	KW1
F	paling kalau kelurahan dengan masyarakat hanya eee diskusi			
K3	diskusi maksudnya ada pertemu <i>pertemuan Terus maksudnya kita tolong ke lapangan untuk kerjasama untuk kerja bakti</i> iya itu memang iya tapi <i>kalau untuk masalah anggaran itu jujur tidak</i>	1. Realisasi Anggaran 2. Transparansi Anggaran Kelurahan	W5 W1	KW4 KW1
F	apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengalokasian anggaran kelurahan? apakah ada kendala dalam pengimlementasian anggaran tersebut			
K3	saya jawab apa sebenarnya hahaha kalau memang saya jawab kalau memang seandainya anggaran itu kita yang kelola iya iya kan ade iya Kendala-kendala tapi ini kan istilahnya kan kita bukan kita yang kelola iya kan kita bukan kita yang kelola anggaran jadi kita tidak bisa menjawab ha itu ade kecuali kalau itu DPA itu dia masuk ke kita kita Lurah sendiri yang pegang DPA sa rasa sa bisa menjawab semua ade tapi ini <i>kita punya DPA itu kan satu pintu dengan distrik</i> jadi kita kita mau kelola apa dengan anggaran saja dia minus itu kadang itu Jujur sajae kadang itu kalau kita terima 50 juta satu kali pencairan itu paling yang	1. Penyusunan DPA	W9	KW5

	dipotong oleh distrik itu hampir sekitar 20-an sisa 30 30 juta itu kita mau kelola untuk apa sedangkan kita punya utang ade Di luar banyak makan minum saja kita kerja pasti jadi itu minimal itu itu paling tinggi itu hampir ada 2 juta 2 juta lebih itu kita utang terus mana juga saya bagi juga untuk anak-anak yang ada kalau untuk PNS memang itu tidak Tapi kalau honor itu diwajibkan			
F	karna kekurangan dari anggaran tersebut			
F	baik apa saja ee harapan apa yang ibu ee apa harapan ibu kedepanya untuk kemajuan kelurahan warmasen			
K3	ee ya saya berdoa mudah-mudahan Insya Allah ya uhum tahun-tahun depan atau pimpinan baru itu bisa memperhatikan semua ini kita harapkan kita harapkan untuk kita punya <i>pimpinan baru ini dia bisa memperhatikan itu apa yang apa yang keluarnga kita kita untuk kelurahan maupun kepala distrik kita punya keluhan itu bisa terjawab dan bisa mengakomodir semua masyarakat yang ada di warmasen</i> bisa semua bisa terjawab dan Dan bisa merasakan juga bisa merasakan ya istilahnya kata saranya yaitu uang lah karena selama ini jujur ya ade	1. Mengharap Pimpinan Yang Profesional		

<p>kita punya RT Saya punya RT Ini kan ada 12 15 ee 12 RT terus 3 RW jadi semua 15 yang sudah dianggarkan itu yang harus kita harus bayar itu mereka punya honor tapi sampai saat ini nih Kasihan ade jujur tidak ada sama sekali jadi kita lurah ini maksudnya saya itu rasa prihatin karena ini kan putra daerah sini beda dengan orang luar yang tugas di sini ya kan saya kan putra daerah saya rasa sendiri bahwa mungkin saya juga tidak sanggup bukan dalam arti tidak sanggup apa karena ini tadi mereka punya hak tadi iya kan kita punya kita punya hak kita sebetulnya kan tidak bisa bikin apa-apa Padahal kita ini kan anak putra daerah sini yang harus kita perhatikan tapi toh mana saya pikir kita nih 4 lurah ni semua ni sama makanya kita mau turun kerja bakti saja jujur kita mau turun saja kerja bakti saja kita tidak bisa panggil empat tidak bisa undang RT yang lain karena itu kita undang dorang mereka sama-sama deng kita kerja tapi mereka punya hak kita tidak bisa laksanakan asalkan mereka punya hak mau dan tidak mau kita sendiri saya Lurah sekretaris dengan saya punya staf sendiri yang turun kerja <i>kalau</i></p>			
--	--	--	--

	<i>seandainya saya sendiri yang pegang DPA itu saya bisa atur ade tapi bukan kita yang pegang DPA jadi kita tidak bisa no coment kita tidak bisa berbicara mau bicara apa kita tidak pegang uang yang dikasih oleh distrik ya itu saja yang kita terima</i>			
F	baik terimakasih atas waktunya wasalamualaikum warahmatulahi wabarakatu			

Biodata Informan

Narasumber	Ahmad Slayar
Jabatan	Ketua RT 05
Lokasi	Kelurahan Warmasen
Tanggal	20 Maret 2025
Durasi	4 Menit 8 Detik
Kode Informan	K4

Kode	Jawaban		KK	KT
F	Sebelumnya perkenalkan nama saya Felda Ramadani mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong			
F	Bisa perkenalkan nama bapak siapa dan bekerja sebagai apa?			
K4	Ya nama saya Ahmad slayer saya sebagai ketua rt kelurahan warmasen RT 05			
F	Langsung saja di pertanyaanya			
F	Ee apakah Bapak pernah melihat informasi penggunaan anggaran kelurahan, misalnya di			

	papan pengumuman, media sosial, atau pertemuan warga?				
K4	Tida <i>tida ada selama ini saya belum pernah lihat</i>	Transparansi Kelurahan	Anggaran	W1	KW1
F	Ee menurut Bapa apakah informasi soal anggaran kelurahan mudah diakses oleh masyarakat umum?				
K4	<i>Tidak juga (Anggaran susah di akses oleh masyarakat)</i>	Transparansi Kelurahan	Anggaran	W1	KW1
F	Baik apakah Ibu mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi terkait dana yang digunakan oleh kelurahan?				
K4	Tidak karna <i>kita selama inikan tidak pernah dapat informasi dari kelurahan jadi kita tidak tau juga anggaran dari kelurahan</i> ada ka tidak kita tidak pernah tau dan juga <i>dari kelurahan juga tidak pernah mengkomunikasi ke kitorang tentang anggaran jadikalau di masyarakat kan kitong tanya kita kan tidak tau</i>	1. Transparansi Kelurahan 2. Transparansi Kelurahan	Anggaran Anggaran	W1 W1	KW1 KW1
F	Apakah bapa merasa anggaran yang digunakan oleh kelurahan ee dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat?				
K4	Kalau untuk saya ya tidak juga karna selama ini kan <i>dari kelurahan tidak pernah macam sosialisasi kalau turun ke warga untuk kasi keluar anggaran sekian</i> sekian yang kita gunakan tidak ada juga atau <i>masalah pertemuan dengan masyarakat atau RT tidak</i>	1. Transparansi Kelurahan 2. Partisipasi Anggaran	Anggaran Alokasi	W1 W4	KW1 KW4

	<i>ada juga</i>			
F	Ee apakah bapak pernah mendapat laporan atau penjelasan dari distrik dan kelurahan terkait penggunaan anggaran, misalnya dalam pertemuan RT/RW?			
K4	Tidak ada juga <i>tidak pernah tidak ada</i>	Partisipasi Anggaran	Alokasi W4	KW4
F	Ee apakah bapak pernah berdiskusi atau memberi masukan tentang program yang dibiayai dari anggaran kelurahan?			
K4	Kalau kita selama inikan tidak macam tidak pernah rapat rapat atau pertemuan to <i>tidak ada pertemuan tentang anggaran macam dana ostsus dana ini to tidak ada juga tidak ada pertemuan jadi bagaiman kita mau sampaikan ke masyarakat</i>	Partisipasi Anggaran	Alokasi W4	KW4
F	Jadi apakah menurut bapak dana kelurahan digunakan untuk kegiatan yang memang dibutuhkan oleh warga?^			
K4	Kalau setau saya selama ini tidak ada juga karna untuk masyarakat itu tidak ada yaa itu kosong <i>yang masyarakat iya tau hanya beras saja bantuan-bantuan saja kaya langsung tunai BLT dan sosial itu saja</i>	Realisasi Anggaran	W5	KW4
F	Apa yang bapa harapkan untuk kemajuab kelurahan?			
K4	Iya kalau kita mau harapkan kemajuan itu tergantung pemerintah pemimpin baru sebagaimana berkembang kedepan dan juga <i>seorang pemimpin macam kelurahan itu harus selidiki</i>	Harapan Pemimpin Yang Bagus		

	<i>supaya kedepan itu bagus</i> jangan seperti yang lalu lagi karna sekarang transparan terbuka ya karna itu hak warga juga karna seorang pemimpin hanya dalam apa prinsipnya diam tidak pernah terbuka susah bagaimana katong masyarakat pengen RT juga saja tidak tau apalagi klw masyarakat			
F	Baik sekian dan terimakasih yah pak			

Biodata Informan

Narasumber	Imanuela Materda Reba
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
Lokasi	Kelurahan Warmasen
Tanggal	20 Maret 2025
Durasi	3 Menit 45 Detik
Kode Informan	K5

Hasil Transkrip Wawancara

Kode	Jawaban	Kategori	KK	KT
F	Sebelumnya perkenalkan nama saya Felda Ramadani mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong			
F	Bisa perkenalkan nama bapak/ibu siapa dan bekerja sebagai apa?			
K5	Ya nama saya Manuela Materda Reba pekerjaan belum bekerja ibu rumah tangga			
F	Langsung saja di pertanyaanya			
F	Ee apakah Ibu pernah melihat informasi penggunaan anggaran kelurahan, misalnya di papan pengumuman, media sosial, atau pertemuan warga?			
K5	<i>Tida pernah (Kelurahan tidak menyediakan media informasi terkait anggaran)</i>	Transparansi Anggaran	W1	KW1

F	Menurut Ibu, apakah informasi soal anggaran kelurahan mudah diakses oleh masyarakat umum?			
K5	Tidak (<i>informasi anggaran kelurahan susah di akses oleh masyarakat</i>)	Transparansi anggaran	W1	KW1
F	Apakah Ibu mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi terkait dana yang digunakan oleh kelurahan?			
K5	Tida juga (<i>Kelurahan tidak pernah sosialisasi atau pertemuan terkait anggaran</i>)	Transparansi anggaran	W1	KW1
F	Apakah Ibu merasa anggaran yang digunakan oleh kelurahan ee dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat?			
K5	Iya kalau dapat bantuan pernah dapat dari kelurahan	Realisasi anggaran	W5	KW4
F	Apakah Ibu pernah mendapat laporan atau penjelasan dari distrik dan kelurahan terkait penggunaan anggaran, misalnya dalam pertemuan RT/RW?			
K5	Tidak pernah (<i>kelurahan tidak pernah melibatkan masyarakat dalam menentukan alokasi anggaran</i>)	Partisipasi Alokasi Anggaran	W4	KW4
F	Apakah Ibu, pernah berdiskusi atau memberi masukan tentang program yang dibiayai dari anggaran kelurahan?			
K5	Tidak pernah juga (<i>kelurahan tidak pernah melibatkan masyarakat dalam menentukan alokasi anggaran</i>)	Partisipasi Alokasi Anggaran	W4	KW4
F	Apakah menurut Ibu dana kelurahan digunakan untuk kegiatan yang memang dibutuhkan oleh warga?			
K5	Kadang-kadang saja	Realisasi Anggaran	W5	KW4
F	Apakah ibu ada harapan			
K5	Iya baik terimakasih atas kesempatan harapan saya semoga berkah di kelurahan kami khusus kelurahan warmasen bisa jadi baik yang terbaik dan saya juga di	Berharap kemajuan kelurahan		

	kelurahan warmasen mengucapkan terimakasih karna sudah mendapatkan uang dari kelurahan setempat dan semoga kedepan kelurahan kami semakin yang terbaik			
F	Baik terimakasih			

Lampiran 3. Hasil Analisis Data

Kategori	KK	Tema	KT	Tipe Kode	Ref					Jumlah
					K1	K2	K3	K4	K5	
Transparansi Anggaran Kelurahan	W1	Transparansi Informasi Publik	KW 1	Deduktif	2	2	5	5	3	17
Penyusunan Anggaran Sesuai Standar Akuntabilitas	W2	Akuntabilitas Anggaran	KW 2	Deduktif	2	0	0	0	0	2
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran	W3	Pertanggungjawaban anggaran	KW 3	Deduktif	1	4	0	0	0	5
Partisipasi Alokasi Anggaran	W4	Alokasi Anggaran	KW 4	Deduktif	1	2	0	3	2	8
Realisasi Anggaran	W5			Deduktif	2	2	2	2	2	10
Anggaran Operasional	W6			Induktif	3	5	4	0	0	12
Pemotongan Anggaran Kelurahan	W7	Kendala Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran	KW 5	Deduktif	0	4	4	0	0	8
Pelaporan Anggaran	W8			Deduktif	0	1	0	0	0	1
Penyusunan DPA	W9			Induktif	0	4	2	0	0	6

Lampiran 4. Member Check In**MEMBER CHECK IN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah informan Ke-1 dengan inisial S. Setelah saya membaca transkrip wawancara yang di buat oleh peneliti atas nama:

Nama : Felda Ramadani
NIM : 146220121027
Judul : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (Studi Kasus Pada
Kelurahan Warmasen Kabupaten Raja Ampat)

Saya menyatakan bahwa data yang tertulis dalam transkrip wawancara adalah benar berasal dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Warmasen 18 April 2025

Yang Menyatakan



Informan Ke-(1)

MEMBER CHECK IN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah informan Ke-2 dengan inisial ML. Setelah saya membaca transkrip wawancara yang di buat oleh peneliti atas nama:

Nama : Felda Ramadani
NIM : 146220121027
Judul : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (Studi Kasus Pada
Kelurahan Warmasen Kabupaten Raja Ampat)

Saya menyatakan bahwa data yang tertulis dalam transkrip wawancara adalah benar berasal dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Warmasen 30 April 2025

Yang Menyatakan



Informan Ke-(2)

MEMBER CHECK IN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah informan Ke-3 dengan inisial HM. Setelah saya membaca transkrip wawancara yang di buat oleh peneliti atas nama:

Nama : Felda Ramadani
NIM : 146220121027
Judul : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (Studi Kasus Pada
Kelurahan Warmasen Kabupaten Raja Ampat)

Saya menyatakan bahwa data yang tertulis dalam transkrip wawancara adalah benar berasal dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Warmasen 10 Maret 2025

Yang Menyatakan



Informan Ke-(3)

MEMBER CHECK IN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah informan Ke-4 dengan inisial AS. Setelah saya membaca transkrip wawancara yang di buat oleh peneliti atas nama:

Nama : Felda Ramadani

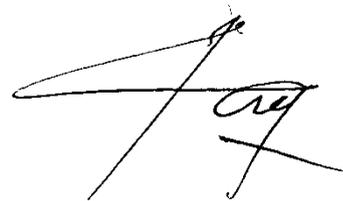
NIM : 146220121027

Judul : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (Studi Kasus Pada
Kelurahan Warmasen Kabupaten Raja Ampat)

Saya menyatakan bahwa data yang tertulis dalam transkrip wawancara adalah benar berasal dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Warmasen 20 Maret 2025

Yang Menyatakan



Informan Ke-(4)

MEMBER CHECK IN

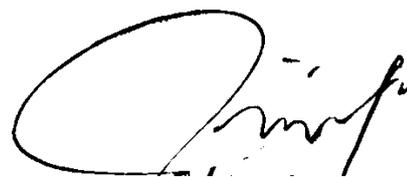
Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah informan Ke-5 dengan inisial M. Setelah saya membaca transkrip wawancara yang di buat oleh peneliti atas nama:

Nama : Felda Ramadani
NIM : 146220121027
Judul : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (Studi Kasus Pada
Kelurahan Warmasen Kabupaten Raja Ampat)

Saya menyatakan bahwa data yang tertulis dalam transkrip wawancara adalah benar berasal dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Warmasen 20 Maret 2025

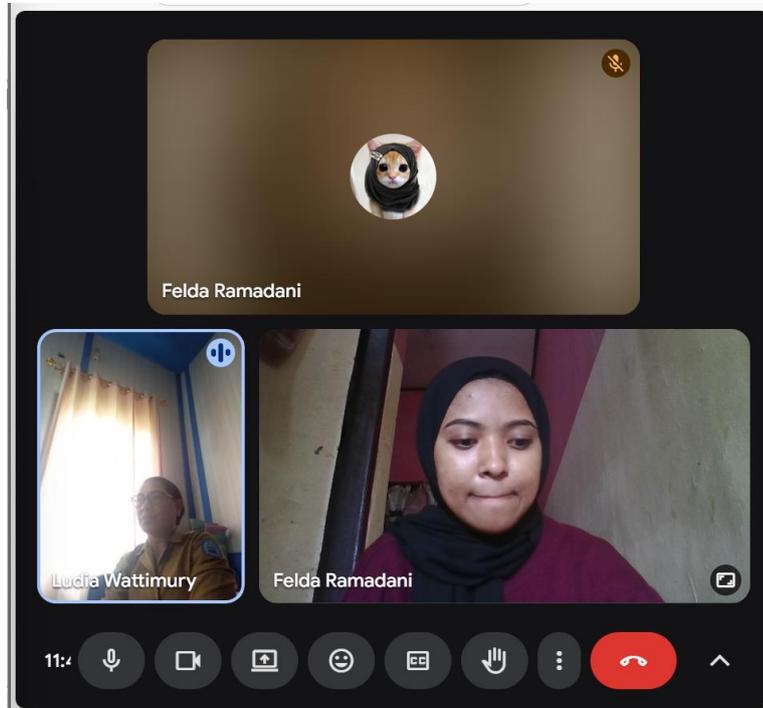
Yang Menyatakan



Informan Ke-(5)

Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan

1) Dokumentasi Informan 1



2) Dokumentasi Informan 2



3) Dokumentasi Informan 1



4) Dokumentasi Informan 4



5) Dokumentasi Informan 5

